



TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL & STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL



PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXI & SEMINAR NASIONAL 2020
25 - 26 AGUSTUS 2020

**TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL &
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF
DI ERA NEW NORMAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXI DAN SEMINAR NASIONAL 2020**

Indonesia, 25 – 26 Agustus 2020



**TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL &
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF
DI ERA NEW NORMAL**

**PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXI DAN SEMINAR NASIONAL 2020**

Indonesia, 25 – 26 Agustus 2020



TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL & STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL

PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXI DAN SEMINAR NASIONAL 2020

Indonesia 25 - 26 Agustus 2020

PENASIHAT Perry Warjiyo, Halim Alamsyah, Wimboh Santoso

PANITIA PENGARAH Solikin M. Juhro, Anggito Abimanyu, Dody Budi Waluyo,
Ari Kuncoro, Edhie Purnawan, Anika Faisal

PANITIA PELAKSANA Anika Faisal, Lely Pelitasari, Idah Rosidah, Yusuf Wicaksono H

BIDANG SIDANG PLENO Arlyana Abubakar, Indriayu Afriana, Aditya Febriansyah,
Rahma Wasiaturrahma, Alwiyah, Ni Nyoman Sawitri, Herman Boediyono

BIDANG KAJIAN TERAPAN EKONOMI DAERAH/SMALL RESEARCH Ayi Ahadiat,
Amir Halid, Eko Purwanto, Rahma Wasiaturrahma

BIDANG SEMINAR NASIONAL Ninasapti Triaswati, Yugi Prayanto, Ina Primiana,
Bayu Krisnamurthi, Bustanul Arifin, Nimmi Zulbainarni, Erwin Haryono, Yunita Resmi Sari,
Betayuanita, Dwini Handayani

BIDANG CALL FOR PAPERS JEI Kiki Verico, Teguh Dartanto, Muhammad Firdaus,
Amalia A. Widyasanti, Aldrin Herwany, Reza Anglingkusumo, Mohammad D. Revindo,
Yohanes B. Kadarusman, Devanto Pratomo, Eny Sulistyaningrum, Achmad Suryana,
Zamroni Salim, Tarsidin

RAPORTEUR SEMINAR NASIONAL Y. Sri Susilo, Y.B. Kadarusman, Wardhana,
MHA Ridwan, Asep Budi Brata, Arief Budi Laksono

PENDANAAN & SPONSORSHIP Jahja Setiaatmadja, Sunarso, Hery Gunardi, Sis Apik
Wijayanto, Pahala Mansyuri, Lisawati

HUMAS & PUBLIKASI Eko B. Supriyanto, Junanto Hedriawan, Tomi Aryanto, Chamdan
Purwoko

EDITOR Solikin M. Juhro, Firman S. Parningotan

PENERBIT
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

REDAKSI
Jl. Daksa IV/9. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Email: isei.pusat@gmail.com
Website: www.isei.or.id

ISBN 978-602-14722-8-6

Cetakan Pertama Desember 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun



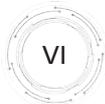
**TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL &
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF
DI ERA NEW NORMAL**

PROSIDING
SIDANG PLENO ISEI XXI DAN SEMINAR NASIONAL 2020

Indonesia, 25 – 26 Agustus 2020

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA PANITIA PENGARAH Dr. Solikin M. Juhro	IX
LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT Anika Faisal	XV
SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ISEI Dr. Perry Warjiyo	XVII
<i>KEYNOTE SPEECH: STRATEGI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL</i> Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)	XXI
RINGKASAN EKSEKUTIF	XXIII
<i>SMALL RESEARCH</i> ISEI CABANG SELURUH INDONESIA: “DAMPAK COVID-19 PADA PEREKONOMIAN DAERAH” Dr. Anggito Abimanyu (Ketua Bidang I PP-ISEI) Dr. Rahma Wasiaturrahma (Anggota Bidang I PP-ISEI)	XXV
MODAL KESEHATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF Prof. Iwan Jaya Aziz (Cornell University)	XXXI
INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF Prof. Mari Elka Pangestu (Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank)	XXXV



PEMULIHAN SEKTOR RIIL DAN KETENAGAKERJAAN SECARA INKLUSIF Rosan P. Roeslani (Ketua Umum KADIN)	XXXIX
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA INKLUSIF Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur BCA)	XLIII
RUMUSAN HASIL DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	XLVII
ABSTRAK ARTIKEL PEMENANG <i>CALL FOR PAPERS</i>	1
GLOBALISASI DAN DAYA SAING USAHA	3
<i>IDENTIFYING EQUILIBRIUM CREDIT GROWTH RESPONSE TO POLITICAL EVENT AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS SHOCKS</i> Rozy Ahimsyah Pratama & Edhie Purnawan	5
PEMETAAN <i>INTELLECTUAL CAPITAL</i> INDUSTRI KREATIF SENI PERTUNJUKAN DI JAWA TIMUR Gendut Sukarno	7
<i>ANALYSIS OF DOMESTIC CREDIT GROWTH IN INDONESIA THROUGH VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND HODRICK-PRESCOTT FILTER APPROACH</i> Rozy Ahimsyah Pratama, Muhammad Edhie Purnawan & Indah Septiana Putri	9
DAMPAK KEBIJAKAN TARIF TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: <i>GLOBAL TRADE ANALYSIS PROJECT (GTAP) ANALYSIS</i> Kartini & Silvia Margaret	11
KEUANGAN NEGARA, INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN	13
DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DISABILITAS TERHADAP PARTISIPASI DAN UPAH KERJA DI INDONESIA Ririn Nopiah & Evita Hanie Pangaribowo	15

<p><i>QUANTILE REGRESSION FOR PANEL DATA: THE INVESTIGATION OF DETERMINANTS OF HOUSEHOLDS' NET WEALTH IN INDONESIA</i></p> <p>Thomas Soseco</p>	17
<p>ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN POKOK RUMAH TANGGA DI INDONESIA TAHUN 2000-2014</p> <p>Indrawan Firdauzi</p>	19
<p>MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM BERBASIS DIGITAL DI ERA <i>NEW NORMAL</i> MELALUI PENDEKATAN ANP</p> <p>Irman Firmansyah, Wildan Dwi Dermawan, Andri Helmi Munawar & Dede Arif Rahmani</p>	21
MAKRO EKONOMI, PASAR KEUANGAN DAN KEUANGAN SYARIAH	23
<p><i>DOES DAMAGE FROM NATURAL DISASTER AFFECT CHILD LABOR? EVIDENCE FROM INDONESIA</i></p> <p>Tito Sulistyو & Wildan Syafitri</p>	25
<p><i>BEHAVIOUR OF STOCK RETURNS DURING COVID-19 PANDEMIC: EVIDENCE FROM SIX SELECTED STOCK MARKET IN THE WORLD</i></p> <p>Helma Malini</p>	27
<p>MEMBANGUN KEMANDIRIAN INDUSTRI BENIH PADI NASIONAL</p> <p>Bambang Sayaka, Frans BM Dabukke & Sri Suharyono</p>	29
<p><i>THE IMPACT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) ON STUDENT EXPENDITURE AND SCORES</i></p> <p>Randi Kurniawan & Rakhmawati</p>	31
EKONOMI DAERAH, PANGAN DAN ENERGI	33
<p>PENGARUH PEMILIKAN ASSET PENGHIDUPAN TERHADAP KEMISKINAN RUMAH TANGGA TANI</p> <p>Pantjar Simatupang & Herlina Tarigan</p>	35

PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Vitriyani Tri Purwaningsih	37
APAKAH PENGGUNAAN INTERNET MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA?: STUDI KASUS PERDESAAN INDONESIA M. Fahmi Priyatna	39
PEMETAAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN <i>GEOGRAPHICALLY WEIGHTED LASSO</i> Rita Herawaty Br Bangun & Aida Meimela	41
EKONOMI KREATIF, DIGITALISASI DAN UMKM	43
<i>THE IMPORTANCE OF EWOM ELEMENTS ON ONLINE REPURCHASE INTENTION: ROLES OF TRUST AND PERCEIVED USEFULNESS</i> Raden Bernard Eka Hutomo Putra Maduretno & Sheellyana Junaedi	45
KETAHANAN ENTREPRENEUR PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Paskanova Christi Gainau & Yuli Rawun	47
PERAN <i>PERCEIVED EFFECTIVENESS OF ESCROW SERVICES PADA E-COMMERCE</i> DI INDONESIA Ratna Dewi Kusumawati & Hanif Aulawi	49
<i>BITCOIN IN INDONESIA: HEDGING OR INVESTMENT INSTRUMENT?</i> William Wardoyo, Chaikal Nuryakin & Sean Hambali	51
FOTO-FOTO ZOOM SESSION	A



PENGANTAR PANITIA PENGARAH

Dalam rangkaian kegiatan Sidang Pleno ISEI XX dan Seminar Nasional 2019 yang lalu, Ketua Umum PP-ISEI, Dr. Perry Warjiyo menggarisbawahi bahwa tantangan perekonomian yang begitu kompleks memerlukan kontribusi nyata dan berbagai terobosan ISEI guna mendukung penguatan perekonomian Indonesia. Untuk itu pula, ISEI secara kelembagaan juga telah merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga agar sesuai dengan tantangan perubahan lingkungan strategis yang ada. VISI ISEI dirumuskan menjadi suatu organisasi perkumpulan sarjana yang terpercaya yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dengan didukung oleh penguatan sinergi akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun daerah dan pelaku dunia usaha.

Pada Sidang Pleno ISEI XX tersebut ditetapkan Propinsi Kalimantan Timur untuk menjadi tuan rumah Sidang Pleno ISEI ke XXI pada tahun 2020. Namun demikian, dengan memperhatikan kondisi dan situasi terkait dengan penyebaran wabah (pandemi) Covid-19 yang saat ini masih belum bisa diprediksikan kapan sepenuhnya reda, Ketua Umum PP-ISEI menyetujui perubahan format kegiatan Sidang Pleno XXI dan Seminar Nasional ISEI 2020 dengan menggunakan platform virtual (*webinar/web conference*) yang dikoordinasikan oleh kepanitian PP-ISEI.

Sebagaimana diketahui bersama, dalam satu dekade terakhir pasca periode krisis keuangan global 2008/09 kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif, pertumbuhan ekonomi tetap meningkat dan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Indikator kesejahteraan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan juga menurun. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari pengelolaan makroekonomi yang disiplin serta penguatan struktur ekonomi yang terus ditempuh

secara konsisten. Walaupun demikian, tantangan perekonomian ke depan tetap tidak ringan. Tantangan yang sudah merupakan keniscayaan adalah pesatnya peningkatan peran teknologi digital dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia (*rising digitalization*). Perkembangan ini perlu dicermati karena selain dapat berdampak positif dalam meningkatkan kenaikan efisiensi dan produktivitas perekonomian, teknologi digital juga dapat membawa disrupsi dalam perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik. Perkembangan teknologi digital makin menambah tantangan bagi perekonomian yang bersumber dari global dan domestik. Dari global, tantangan bersumber dari produktivitas yang menurun, kebijakan *inward looking* yang meluas, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Sementara tantangan dari domestik berhubungan dengan kinerja sektor industri pengolahan yang belum kuat, daya dukung infrastruktur yang masih terbatas, sumber pembiayaan domestik yang belum optimal, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus dikembangkan.

Berbagai tantangan tersebut perlu direspons dengan tepat sehingga tetap dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan inklusif. Indonesia yang maju dan inklusif bermakna bahwa perekonomian Indonesia didukung stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketahanan eksternal yang kuat, dan kesejahteraan masyarakat luas yang meningkat. Stabilitas perekonomian, baik stabilitas harga maupun stabilitas sistem keuangan, yang terjaga menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketahanan eksternal yang kuat yang tercermin pada neraca pembayaran surplus serta struktur pembiayaan luar negeri yang sehat, diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat berupa angka pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta ketimpangan antar kelompok pendapatan masyarakat dan antar wilayah di Indonesia yang mengecil, diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Permasalahan tidak berhenti disitu, karena dunia saat ini mengalami **krisis kesehatan** yang mahadasyat akibat penyeberan **pandemi Covid-19** yang mulai muncul sejak akhir 2019 di China. Dalam perkembangan terakhir Covid-19 menyebabkan 1,476,819 orang yang terinfeksi dengan kematian sebesar 87,816 orang (ASEAN, 2020). Beberapa negara merespon melalui kebijakan pembatasan pergerakan orang atau *lock down* dalam rangka memutus tali rantai penularan virus, yang menyebabkan

aktivitas perekonomian mengalami stagnasi, dengan ditandai oleh hampir semua kegiatan ekonomi produktif di semua negara terhenti. Krisis kesehatan yang awalnya mendistorsi sisi penawaran (*supply disruption*) akhirnya memberikan shock yang besar di sisi permintaan (*demand shock*). Langkah kebijakan ekonomi yang masif termasuk pemberian stimulus ekonomi yang sangat besar oleh otoritas fiskal dan moneter belum mampu menahan kejatuhan ekonomi yang melebihi krisis atau resesi terburuk sejak periode depresi awal abad 20. IMF kini memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%, atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April 2020.

Akibat pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Krisis di bidang kesehatan yang diakibatkan oleh Covid-19 juga telah memberikan efek domino kepada bidang-bidang yang lain, yaitu sosial, ekonomi, dan keuangan. Hal ini antara lain terlihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 yang mengalami perlemahan yang cukup signifikan (2.97%), dan pada kuartal II-2020 diperkirakan akan menjadi negatif. Langkah **bauran kebijakan ekonomi nasional** (*national policy mix*) antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, beserta otoritas kebijakan untuk menstimulus dan menyelamatkan ekonomi Indonesia juga tidak tanggung-tanggung, melalui berbagai program terukur, baik dalam rangka penanganan kesehatan, pemberian bantalan keamanan sosial, maupun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Spirit dasar dari berbagai langkah yang dilakukan tersebut adalah bahwa, dalam jangka pendek, bagaimana menumbuhkan permintaan masyarakat ditengah *supply disruption* dan *demand shock* yang terjadi. Sisi permintaan ditumbuhkan terlebih dulu dengan harapan akan diikuti oleh peningkatan sisi penawaran. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk men-*jumpstart* perekonomian melalui strategi penyerapan anggaran yang cepat dan tepat, sebagaimana pula program peningkatan pengeluaran untuk *public goods*, seperti bantuan sosial, yang dilakukan pada masa-masa awal dan kemudian diikuti oleh program-program yang lebih terintegratif, yaitu Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**. Dalam perspektif waktu selanjutnya, diharapkan dampak stimulus moneter dan keuangan akan bekerja untuk mengakselerasi kegiatan sektor riil lebih lanjut, tentunya dengan dukungan peran aktif dunia usaha dan masyarakat.

Langkah penyelamatan perekonomian perlu dilakukan secara

menyeluruh, termasuk mengawal penerapan **tatanan kehidupan baru** (*new normal*) untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. *New normal* merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Penerapan *new normal* diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, dimana dengan mulai beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan pada akhirnya mengontrol pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui *new normal*, otoritas kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain semua pihak juga diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.

Sebagaimana fakta sejarah, krisis merupakan fenomena yang *unprecedented and prolonged*, dan ironiknya *recurrent*. Tahun-tahun kedepan pastinya akan menjadi masa yang sulit. Oleh karena itu, kesiapan, ketahanan, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi dengan terobosan yang implementable menjadi kunci untuk mengawal perjalanan ekonomi nasional di era *new normal* ke depan. Dalam kaitan ini, pengelolaan ekonomi dalam era *new normal* ke depan dipastikan membutuhkan terobosan pemikiran atau paradigma baru. **Paradigma pembangunan** berbasis inovasi yang mampu mendorong ekonomi Indonesia untuk bangkit, tumbuh secara berkesinambungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Paradigma pertumbuhan ekonomi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang terbua lebar, serta mendorong produktivitas perekonomian Indonesia.

Hal tersebut dapat diupayakan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang mendukung kelembagaan yang kuat, dan intervensi teknologi disamping penyediaan infrastruktur fisik diberbagai daerah di tanah air. Kita tentunya tidak berangkat dari titik nol, karena besarnya *endowment* dan modal dasar pembangunan telah kita miliki, termasuk dalam bentuk *cultural capital* dan *values* yang selama ini hidup dalam tatanan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan potensi generasi produktif yang ada, pengembangan sektor-sektor yang memiliki basis pemberdayaan masyarakat luas, seperti UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi syariah menjadi agenda strategis yang harus dilaksanakan dalam rangka memperkuat spirit pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan latar belakang diatas, menjadi penting dan relevan menetapkan tema Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional tahun 2020 sebagai, yaitu: ***“Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional & Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal”***. Termasuk dalam rangkaian kegiatan Sidang Pleno ISEI XX dan Seminar Nasional adalah: Undangan penulisan karya ilmiah (*call for paper*) untuk dipresentasikan dan dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Indonesia (JEI) yang dikelola ISEI; Kajian Terapan (*small research*) Ekonomi Daerah yang akan dilakukan secara inklusif oleh 34 ISEI Cabang, dengan tema: “Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah dan Implikasi Kebijakan”; Internasional *workshop* untuk penulisan jurnal ilmiah berstandar internasional; dan *Joint international conference* dan *call for paper Bulletin Monetary Economics and Banking (BMEB)*, terindeks Scopus.

Kami berharap agar dengan sukses terlaksananya Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020, kita semua dapat mempererat silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara, serta memperkuat basis pengelolaan organisasi ISEI dalam mewujudkan visinya sebagai organisasi yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional, yang didukung oleh penguatan sinergi antar pengampu kebijakan di pusat dan daerah. Diharapkan peran aktif ISEI akan terus meningkat dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan-perguruan tinggi serta terus memperkaya dan memperbaharui pemikiran-pemikiran teoritikal terkini, sekaligus mampu memberikan pemikiran-pemikiran aplikatif. Output dari kegiatan nasional adalah rumuan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 dan menavigasi era new normal. Hasil perumusan kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah dan stakeholders, sebagai masukan perspektif/pemikiran ISEI.

Dr. Solikin M. Juhro

Ketua Panitia Pengarah & Sekretaris Umum PP-ISEI





SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuuh
Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada kita semua sehingga kita telah sukses menyelenggarakan Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020.

Seyogyanya sesuai mandat Sidang Pleno ISEI ke XX di Bali tahun 2019 telah ditetapkan Kota Samarinda sebagai tuan rumah Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020. Namun adanya pandemi Covid 19 tidak memungkinkan dilakukan kegiatan berskala besar pada masa ini. Pada waktu yang bersamaan menjadi sangat penting bagi ISEI selaku Organisasi Profesi untuk menyumbangkan pemikiran dan berkontribusi, utamanya terkait upaya pemulihan ekonomi. Oleh karenanya atas kesepakatan Pengurus Pusat dan Cabang Samarinda diputuskan untuk tetap menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan platform virtual.

Sidang Pleno ke XXI dan Seminar Nasional 2020 mengangkat tema "Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional & Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era *New Normal*". Diangkatnya Tema ini dipilih dengan tujuan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh perekonomian nasional baik dalam perspektif struktural jangka panjang maupun perspektif permasalahan ke depan, khususnya terkait dengan strategi kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dalam mengatasi permasalahan pemulihan ekonomi pandemi Covid-19 dan menavigasi era new normal.

Dalam kedua perspektif tersebut, diperlukan rumusan strategi kebijakan yang optimal dalam mengawal stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional menuju negara maju, sejahtera dan berkeadilan. Untuk itu, Sidang Pleno dan Seminar Nasional ini akan

merumuskan suatu “perspektif pemikiran dan rekomendasi kebijakan ekonomi ISEI” yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rangkaian Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Agustus ini dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang melibatkan seluruh ISEI Cabang se Indonesia, yang dilanjutkan dengan beberapa agenda tahunan yang menjadi ciri khas ISEI yaitu Seminar Nasional dan Call for Paper. Terpilih 20 paper terbaik dari seluruh paper yang diterima Panitia. Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020 dihadiri oleh lebih dari 1000 peserta yang berasal dari Pengurus Pusat, Pengurus ISEI cabang seluruh Indonesia, berikut anggota ISEI seluruh Indonesia yang join di platform zoom maupun mengikuti jalannya acara melalui youtube live streaming.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Dr (HC). Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., yang telah berkenan hadir dan memberikan Keynote pada Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional kali ini, para Narasumber, Ketua Umum ISEI dan seluruh jajaran PP-ISEI, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, seluruh undangan.

Akhirnya, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh sponsor Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020 sehingga acara dapat terselenggara dengan baik sukses. Terimakasih kami sampaikan kepada:

BANK BCA, JARUM GROUP, BANK BRI, BANK BNI, BANK MANDIRI, BANK BTN, INDOFOOD, BANK BJB, BANK JAGO, LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN, BANK SINARMAS, MAYBANK, PEGADAIAN, BANK CIMB NIAGA, BANK DANAMON, BANK MAS, BANK PERMATA, BANK GANESHA, BANK DKI, OCBC NISP BANK, BANK JASA JAKARTA.

Semoga ISEI senantiasa dapat berkontribusi bagi kemaslahatan bangsa dan negara menuju masyarakat Indonesia yang lebih maju, yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarokatuh

Anika Faisal

Ketua Panitia Pelaksana



SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ISEI

*Bismillahirrohmanirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom,
Om Swastyastu, Namu Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA., para senior kami-ketua-ketua ISEI yang telah merintis ISEI menjadi besar, para anggota Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang ISEI dari seluruh dunia, para pembicara hari ini-Prof. Dr. Iwan Jaya Azis, Prof. Dr. Mari Pangestu, Bapak Rosan P. Roeslani, dan Bapak Jahja Setiaatmadja, para sponsor dan seluruh panitia yang menyelenggarakan sidang pleno ISEI tahun ini.

Puji syukur, kita dapat menyelenggarakan sidang pleno ISEI XXI di tengah pandemi COVID-19. Dengan rahmat dan lindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita juga bersyukur bahwa rangkaian-rangkaian kegiatan ISEI yang telah kita lakukan, sejak para pendahulu kami, telah banyak mencapai kemajuan. Sebagaimana kita lakukan juga sejak saya menjadi ketua ISEI 2 (dua) tahun yang lalu, berbagai transformasi ISEI telah kita lakukan. Bagaimana ISEI bisa menjadi lembaga yang berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional dengan didukung oleh penguatan-penguatan sinergi baik di dalam merumuskan kebijakan, di dunia akademis, maupun juga bagaimana kita mendharma baktikan kepada masyarakat. Berbagai kemajuan tersebut kita lakukan melalui 3 (tiga) strategi yakni penguatan peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, penguatan peran ISEI dalam peningkatan kualitas akademis dan riset di perguruan tinggi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga profesi baik secara nasional maupun internasional.

Dalam dua tahun terakhir ini telah banyak kemajuan yang kita capai, termasuk pengesahan AD/ART yang baru yang lebih terstruktur, terpadu, dan forward looking; yang mengakomodir lingkungan strategis dan tantangan ke depan, serta penguatan peran ISEI, baik pusat dan daerah. Kajian Kebijakan Publik juga telah secara rutin kita terbitkan. Jurnal Ekonomi ISEI saat ini telah terbit secara regular 3 kali setahun. Kerja sama dengan lembaga internasional, Bank Dunia, IMF, ADB, IDB, FAEA, dan banyak lainnya juga telah kita tingkatkan. Demikian juga berbagai pelatihan dan kegiatan riset di pusat dan daerah terus kita lakukan. Kita juga terus meningkatkan berbagai kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* di 32 (tiga puluh dua) ISEI Cabang. Kita telah memulai LAMEMBA, lembaga akreditasi di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Semua ini adalah hasil kerja sama kita semua, pengurus pusat dan pengurus cabang yang bahu-membahu untuk memajukan ISEI dalam berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Rangkaian sidang pleno ISEI XXI tahun ini terus kita tingkatkan. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tekad kita. Sehariian kemarin kita telah melakukan ISEI Call for Paper dan FGD untuk kebijakan-kebijakan ekonomi di daerah. Terima kasih terhadap seluruh pengurus dan anggota ISEI yang kemarin telah menyajikan rumusan-rumusan kebijakan ekonomi daerah. Siang nanti, kita akan menyelenggarakan sidang pleno dan besok sampai Jumat kita akan mengadakan *joint event* untuk *international call for paper* BMEB dan BEMB *Lecture*. Kesemuanya ini menunjukkan upaya dan usaha kita untuk membawa ISEI terus maju.

Pada pagi ini kita akan membahas bagaimana kita mencari solusi-solusi positif dan konkrit untuk pemulihan ekonomi nasional dan strategi kebijakan pengembangan ekonomi inklusi di era kenormalan baru (*New Normal*). Kami bangga, bersyukur, dan berterima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA., yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan penjelasan strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang ditempuh. Saya tahu betul bagaimana Beliau memimpin berbagai rumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi nasional untuk segera memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Saya juga tahu betul, bagaimana koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya terus diperkuat untuk segera memulihkan ekonomi Indonesia. Bagaimana kita membuka sektor-sektor ekonomi

yang produktif dan aman, bagaimana kita mempercepat realisasi anggaran dan juga BI bisa berperan dalam pendanaan dan berbagi beban dalam mendukung percepatan realisasi anggaran. Bagaimana kami di Bank Indonesia juga terus melakukan stimulus-stimulus di bidang moneter dan perbankan. Bagaimana restrukturisasi dunia usaha dan kredit dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana mendorong UMKM, termasuk juga digitalisasi untuk bisa menjadi kekuatan baru di pusat dan daerah bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan juga sinergi dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA., untuk bisa memberikan *keynote speech* dalam seminar nasional yang membanggakan ini. Dan sekaligus, tentu saja, memberikan arah bagaimana ISEI bisa menyumbangkan rumusan-rumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan bimbingan, kemudahan, kekuatan, dan keberkahan bagi upaya kita bersama.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dr. Perry Warjiyo

Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI





**KEYNOTE SPEECH:
STRATEGI KEBIJAKAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
(Ringkasan Eksekutif)**

**Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)**

Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia semakin meningkat, terutama karena keberhasilan pemerintah untuk terus meningkatkan uji Covid-19 kepada masyarakat. Jumlah test yang berhasil dilakukan pemerintah sudah mencapai 2 juta orang, angka yang relative tinggi dibandingkan negara lain. Hanya memang jika diukur per 1 juta penduduk, maka angka tersebut masih relative rendah sehingga masih perlu ditingkatkan lagi uji Covid-19 kepada masyarakat. Demikian juga kasus kesembuhan Covid-19 di Indonesia yang mencapai 71,5% relative tinggi meskipun diiringi dengan tingkat kematian yang juga relative tinggi. Untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan berbagai Lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan vaksin yang efektif untuk dapat diproduksi secara masal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu pemerintah pun telah menetapkan vaksin yang tercipta nantinya akan menjadi barang public yang bisa diakses oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan harga yang terjangkau. Pemerintah memproyeksikan vaksin Covid-19 akan tersedia pada Januari 2021 atau paling lambat Juni 2021. Dengan demikian diharapkan kegiatan masyarakat dan ekonomi dapat kembali normal pada periode tersebut.

Pandemi Covid-19 telah berdampak negative terhadap perekonomian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga global. Hal ini diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami negative sebesar 5,32% pada triwulan II tahun 2020. Dari sisi permintaan, semua komponen pengeluaran rumah tangga, investasi, pemerintah dan ekspor mengalami kontraksi. Sementara dari sisi penawaran, tidak semua lapangan usaha mengalami kontraksi, beberapa sector masih tumbuh secara positif, bahkan diantaranya mampu tumbuh lebih tinggi pada saat pandemic seperti sector informasi dan komunikasi, pertanian (termasuk komoditi sawit) dan pengadaan air. Sektor yang sangat terpukul akibat Pandemi Covid-19 ini adalah sector transportasi dan sector akomodasi dan makanan-minuman.

Dengan terjadinya kontraksi pada kegiatan ekonomi, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pun menjadi meningkat. Akibat Pandemi Covid-19 ini sekitar 2 juta orang mengalami PHK atau dirumahkan, dimana pekerja yang banyak terdampak berada di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Pemerintah pun menghitung tingkat kemiskinan meningkat 0,30 percentage point menjadi 9,71%.

Untuk mengatasi meluasnya Pandemi Covid-19 dan dampak negatifnya terhadap perekonomian nasional, pemerintah melakukan kebijakan adaptasi new normal dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan adaptasi new normal ditujukan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satgas Penanganan Covid-19. Sementara itu program PEN ditujukan untuk menjaga mata pencaharian masyarakat yang menjadi tugas utama dari Satgas PEN.

Kebijakan PEN ditujukan baik untuk sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan program seperti bantuan social, program padat karya dan bantuan subsidi upah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok masyarakat bawah. Sementara dari sisi penawaran program seperti penurunan tarif pajak, restrukturisasi UMKM, penempatan dana dan penjaminan serta digitalisasi ekonomi ditujukan agar kegiatan produktif tetap bertahan.

Untuk implementasi berbagai program kebijakan adaptasi new normal dan PEN, pemerintah membutuhkan dana lebih besar. Diperkirakan kebutuhan dana pada tahun 2020 mencapai Rp. 695,2 trilyun. Demikian juga kebutuhan dana penanganan Pandemi Covid-19 masih tetap dibutuhkan pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 356,5 trilyun.

Besarnya kebutuhan dana penanganan Covid-19 ini, sementara penerimaan pemerintah dari pajak pun ikut turun maka mengakibatkan deficit APBN yang semakin besar. Untuk kebutuhan pembiayaan tersebut pemerintah mendorong partisipasi dari masyarakat untuk dapat membeli surat berharga pemerintah. Selain itu, pemerintah pun berinisiatif untuk meminta Bank Indonesia untuk sharing burden dalam penanganan Covid-19 ini dengan penyediaan dana melalui pembelian surat berharga pemerintah dan penyediaan suku bunga yang lebih kompetitif.

A large, faint circular graphic in the background, composed of concentric circles and circuit-like patterns with small nodes and lines.

RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF SMALL RESEARCH ISEI CABANG SELURUH INDONESIA: “DAMPAK COVID-19 PADA PEREKONOMIAN DAERAH”

Dr. Anggito Abimanyu (Ketua Bidang I PP-ISEI) & Dr. Rahma Wasiaturrahma (Anggota Bidang I PP-ISEI)



1. Pendahuluan

Covid-19 menyebabkan 1.476.819 orang terinfeksi dan 87.816 kematian di negara ASEAN (ASEAN,2020). Hal ini menimbulkan kepanikan di seluruh negara. Virus ini menyebar semakin luas secara global dan direpons oleh beberapa negara dengan kebijakan *lock down* guna memutus tali rantai penyebaran virus. Kebijakan *lockdown* ini mengakibatkan stagnasi pada aktivitas perekonomian yang ditandai dengan terhentinya hampir semua kegiatan ekonomi produktif sehingga berujung pada kelesuan ekonomi yang melebihi krisis dan resesi pada periode depresi awal abad ke-20.

Dampak Covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, namun juga mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia (ASEAN Development Bank, 2020). Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2020 menurun di angka 2,97% atau mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah jika dibandingkan Triwulan I-2019 (5,07%) dan Triwulan IV-2019 (4,97%). Selain pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 60.000 orang per Februari 2020. Kelesuan ekonomi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi perekonomian nasional merepresentasikan bahwa kondisi perekonomian daerah tidak jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi daerah

umumnya mengalami penurunan dengan besaran yang berbeda. Bali-nusra mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terparah yaitu sebesar 4,58% (dari 5,52% pada 2019-IV menjadi 0,94% pada 2020-I). Kalimantan mengalami penurunan yang paling rendah yaitu 1,24% (dari 3,73% pada 2019-IV menjadi 2,49% pada 2020-I).

Membangun perekonomian dari daerah di era new normal merupakan upaya yang sangat dibutuhkan guna memperbaiki perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Kondisi yang terdisrupsi pada berbagai sektor harus direspons dengan agilitas yang tinggi, inovatif dan tidak mengandalkan kebiasaan yang sudah pernah terjadi. Mencari solusi secara bersama dan memenuhi tuntutan *local specific* dibutuhkan kajian ekonomi lokal yang "*holistic*", berbasis sumberdaya, digital, kompetensi inti dan didukung oleh upaya inovatif berkelanjutan.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1). Mendeskripsikan dampak Covid-19 pada ekonomi dan sosial di Provinsi dan menyusun kluster serta matriks dampak spesifik. 2). Memproyeksikan dampak Covid-19 pada kondisi perekonomian dan sosial Tahun 2020. 3). Merumuskan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh daerah dengan instrumen (de) regulasi, APBN dan APBD serta sektor keuangan dan pilihan-pilihan kebijakan lainnya.

2. Metodologi

Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1). Kajian data makro di Provinsi sampai dengan Triwulan II-2020: a).PDRB dan inflasi; b).Penerimaan dan belanja APBD Provinsi; c). DPK dan penyaluran kredit perbankan. 2). Indeks mobilitas penduduk di seluruh Provinsi periode Februari-Agustus 2020. 3). Persepsi ekonom terhadap kegiatan ekonomi di daerah.

3. Hasil Penelitian

Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dalam. Kontraksi ekonomi triwulan II 2020 di wilayah Jawa dan Bali lebih tinggi daripada Luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional tahunan pada triwulan II 2020 adalah -5,32%. Beberapa Provinsi mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata nasional, yakni Provinsi Bali -10%; DKI Jakarta -8,22%; Banten -7,2%; DIY -6,74; dan Kalimantan Timur -5,46%.

Di samping kontraksi pertumbuhan ekonomi, rata-rata inflasi nasional Tahunan mencatat tingkat yang rendah, yakni 1,96%. Beberapa daerah mencatat inflasi dibawah rata-rata nasional, yakni di DKI Jakarta 1,9%; DIY 1,8%; Bali 1,1%; dan beberapa bahkan mengalami deflasi, yakni di Sumatera Utara -0,7%; Sumatera Barat -0,5%; NTB -0,1%, Bangka Belitung -0,1%; dan Kepulauan Riau -0,3%. Rendahnya tingkat inflasi atau deflasi juga menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat.

Dampak Covid-19 juga terrefleksi dari menurunnya mobilitas penduduk Indonesia. Pada bulan Februari hingga Agustus 2020, mobilitas penduduk yang diukur dengan Google Mobility Index menunjukkan penurunan di hampir semua Provinsi. Pada umumnya, mobilitas penduduk menurun hingga 30-50% pada bulan Mei 2020. Dan pada saat ini tingkat mobilitas penduduk sudah mulai meningkat pada angka 85-93% dari kondisi Februari 2020. Di DKI Jakarta 72%, Bali 70%, DIY 80%, Bangka Belitung 90%, Kepulauan Riau 85% dan NTB 90%.

Dampak negatif pada kebijakan fiskal dan sektor keuangan sangat terasa di daerah. Penerimaan APBD Provinsi pada triwulan II 2020 menurun rata-rata 20% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2019. Penurunan penerimaan pendapatan di beberapa daerah mengalami penurunan diatas 20%, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat. Penurunan penerimaan tersebut mengakibatkan rendahnya penyaluran anggaran APBD, termasuk realokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Beberapa daerah mengalami kesulitan melakukan penyaluran belanja APBD dalam suasana PSBB.

Penyaluran kredit, termasuk kredit UMKM di daerah juga mengalami penurunan drastis. Pertumbuhan penyaluran kredit tahunan rata-rata dibawah 5%, bahkan kredit UMKM berada dibawah angka tersebut. Beberapa daerah/Provinsi yang mengalami kontraksi paling parah khususnya pada daerah kepulauan berbasis pariwisata dan jasa seperti Bali, NTB, Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Daerah-daerah ini memerlukan alokasi pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Daerah dengan kemampuan keuangan dan fiskal yang kuat namun terkena dampak serius seperti DKI, Banten, DIY, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan dapat

diberikan bantuan keuangan secara terbatas dan semi komersial.

Hasil survei oleh 33 kelompok ekonom di semua Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 56% meyakini bahwa proses pemulihan ekonomi di daerah akan memakan waktu paling tidak 12 bulan. Lebih dari 62% dari responden ekonom meyakini proses pemulihan harus menyentuh masalah lemahnya daya beli masyarakat. Mayoritas responden ekonom di Provinsi Bali, Bangka Belitung dan NTB menyatakan pesimis bahwa proses pemulihan ekonomi akan berjalan lambat, lebih dari 12 bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Provinsi di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dan penurunan daya beli terutama di Jawa dan Bali yang terkena dampak paling serius.
2. Mobilitas penduduk di hampir seluruh Provinsi mengalami penurunan pada Februari 2020 dan mulai mengalami peningkatan saat new normal.
3. Penurunan penerimaan APBD di sebagian besar Provinsi berakibat pada sulitnya realokasi dan belanja pemerintah.
4. Penyaluran kredit dan kredit UMKM mengalami penurunan drastis di sebagian besar Provinsi di Indonesia.
5. Sebagian besar responden ekonom meyakini bahwa proses pemulihan ekonomi di daerah memakan waktu paling tidak 12 bulan, namun mayoritas responden di Provinsi Bali, Bangka Belitung, dan NTB menyatakan pesimis bahwa proses pemulihan ekonomi akan berjalan lambat yaitu lebih dari 12 bulan, mengingat Provinsi ini ditopang oleh sektor pariwisata.
6. Sebagian besar responden ekonom meyakini bahwa pemulihan harus menyentuh masalah lemahnya daya beli masyarakat.

5. Implikasi Kebijakan Perekonomian Daerah

Secara umum, kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peraturan daerah mengenai keseimbangan antara kebijakan kelonggaran dalam mobilitas penduduk, kegiatan ekonomi, dan protokol kesehatan yang disosialisasikan ke masyarakat dan diterapkan dengan tegas.

2. Pemerintah Pusat, Daerah, dan korporasi besar dapat memberikan bantuan atau CSR program digitalisasi UMKM guna meningkatkan pengaplikasian teknologi digital secara masif, sehingga produk UMKM dapat terjangkau dengan mudah oleh masyarakat.
3. Pemerintah Pusat perlu membantu pembiayaan APBD daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, namun mengalami dampak Covid-19 yang serius. Pemerintah daerah perlu mempercepat pencairan anggaran melalui program belanja bantuan sosial yang tepat sasaran.
4. Program restrukturisasi kredit diiringi dengan pembukaan sektor produktif dan aman oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah juga dapat menempatkan dana pemerintah dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di bank daerah.
5. Memperkuat sinergi antar daerah, pusat-daerah, pemerintah-swasta dan mengkapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat pada saat pandemi Covid-19.





Ringkasan Eksekutif:
**MODAL KESEHATAN UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF**

Prof. Dr. Iwan Jaya Aziz (Cornell University)

Plenary Speaker, Sidang Pleno ISEI XXI & Seminar
Nasional 2020

Salah satu hal yang dapat dipersamakan antara kebijakan ekonomi dengan kesehatan adalah keberadaan dari intervensi dan juga dampaknya yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang kesehatan, khususnya dalam situasi pandemi, terdapat intervensi penyembuhan yang secara langsung memiliki dampak terhadap kondisi pandemi. Adapun dampak tidak langsungnya seperti penggunaan alat-alat kesehatan yang dapat digunakan pada kasus-kasus lain di masa yang akan datang. Dari bidang ekonomi, intervensi yang dilakukan dapat berupa stimulus fiskal ataupun moneter yang dapat diukur dampaknya dalam *input-output*, *multiplier effect*, dan sebagainya. Adapun dampak tidak langsung khususnya jika dikaitkan dengan bidang kesehatan adalah keberadaan asuransi kesehatan yang lebih baik.

Dari sisi penelitian ekonomi, pendekatan dalam kondisi saat ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan partial equilibrium melainkan melalui pendekatan general equilibrium. Partial equilibrium kurang tepat digunakan mengingat terlalu banyak asumsi yang digunakan seperti halnya asumsi *ceteris paribus*, yang sudah relevan dengan kondisi faktual yang serba berubah saat ini. Dari sudut ekonomi mikro, penelitian dapat dilakukan dampak terhadap individual agent. Selain itu, dampak dari kondisi pandemi saat ini sudah tidak lagi pada sisi permintaan, namun juga telah berdampak pada sisi penawaran. Hal ini berbeda dengan kondisi krisis sebelumnya yang hanya berdampak pada salah satu sisi saja (permintaan). Penelitian yang dapat dilakukan juga baiknya ditinjau dari sisi *dynamic* dimana dapat diimplementasikan dalam menganalisis kebangkrutan, distribusi kepentingan shareholder dengan stakeholder, dan penyusunan business plan. Business plan dirasa sangat penting mengingat kondisi yang paling sangat dikawatirkan pada saat ini adalah belum dapat diketahui waktu berakhirnya pandemi. Dalam menganalisis kondisi saat ini, beberapa poin yang men-

jadi dasar pemikiran dalam melakukan penelitian ekonomi kesehatan adalah dampak dari terjadinya *shock*. Dari sudut intervensi, hal yang harus dilihat antara lain *Benefit*, *Opportunity*, *Cost*, dan *Risk*. Disamping itu, tetap menggunakan konsep *Opportunity Cost* sebagai dasar dalam menetapkan sebuah kebijakan. Dari sisi ekonomi makro, mengingat pandemi merupakan kejadian yang luar biasa, maka penelitian ekonomi harus berkolaborasi dengan model epidemiologis untuk dapat secara utuh menangkap fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, para ahli epidemiologi menggunakan konsep *Susceptible-Infected-Recovered (SIR)*, yang mana konsep ini menjelaskan bagaimana memetakan pergerakan masyarakat yang *Susceptible*, *Infected*, dan *Recovered*. Kolaborasi ini penting dilakukan khususnya dalam membuat model konsumsi dalam ekonomi makro yang penuh ketidakpastian, dimana konsumsi memiliki peran yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang hampir kurang lebih sebesar 60%. Berdasarkan hasil penelitian dari aplikasi kebijakan selama masa pandemi dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap kesehatan maupun ekonomi akan lebih baik jika dilakukan isolasi secara ketat. Namun hal tersebut memiliki kondisi prasyarat dimana haruslah dilakukan tes sebanyak-banyaknya guna mengetahui masyarakat mana yang terinfeksi. Hal ini penting mengingat dampak penurunan ekonomi bukanlah dari akibat adanya *lock down*, melainkan dari adanya ketakutan terinfeksi. Hal ini dapat diketahui dari penelitian di Amerika Serikat bahwa penurunan ekonomi yang disebabkan oleh *lock down* hanya berkontribusi sebesar 7%. Sedangkan sisanya sekitar 90%-an disebabkan oleh rasa ketakutan.

Dari sisi *Health Capital*, Arrow menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa modal terbagi menjadi empat jenis antara lain *Reproduceable Capital*, *Human Capital*, *Natural Capital*, dan *Health Capital*. Arrow menggunakan pendekatan *Value Statistical Life (VSL)* yang merupakan substitusi marjinal antara biaya dengan risiko nyawa. Berdasarkan konsep ini, diketahui bahwa *Health Capital* ternyata dua kali lipat lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan jenis modal yang lain ketika digabungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya peran *Health Capital* dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dari sisi *inclusiveness*, ketika terjadi sebuah krisis maka dipastikan akan terdapat intervensi guna mempengaruhi *aggregate demand*. Di sisi penawaran, dapat dipastikan kondisi krisis akan menyebabkan datarnya kurva *aggregate supply*. Sebagai ilustrasi adalah bagaimana dampak dari pemerataan terhadap kemiskinan. Ukuran yang paling sederhana

na adalah berapa jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. Maka variabel yang harus diketahui adalah berapa *poverty line* tersebut dan besaran pendapatan/pengeluaran. Selanjutnya, jika terdapat kenaikan inflasi yang disebabkan adanya paket stimulus maka pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan *poverty line* tersebut. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat kebijakan stimulus fiskal dan moneter dapat memperburuk tingkat kemiskinan. Oleh karena hal tersebut, kebijakan yang tepat dalam memperbaiki tingkat kemiskinan dapat berupa kebijakan pembangunan infrastruktur tersier di daerah pedesaan dalam rangka memperlancar UMKM pedesaan yang sangat tergantung dengan pemasaran/distribusinya. Selain itu dapat juga melalui pengembangan sistem informasi bagi masyarakat pertanian guna dapat mengetahui harga produk pertanian secara nasional. Dengan metode seperti tersebut diatas maka penelitian ekonomi dapat mengaitkan dampak stimulus ekonomi makro terhadap masalah *inclusiveness*.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, ekonom dihimbau untuk mengkaji kembali berbagai teori ekonomi yang mulai tidak relevan saat ini. Sehingga harapannya dapat mengeksplorasi model ekonomi yang relevan dengan kondisi negara kita guna menjamin tepatnya sasaran dari kebijakan ekonomi.





Ringkasan Eksekutif: INOVASI MENUJU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF

Prof. Dr. Mari Elka Pangestu (Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank)
Plenary Speaker, Sidang Pleno ISEI XXI & Seminar Nasional 2020

Dampak Pandemi Covid-19 secara besar-besaran dapat menggagalkan Agenda 2030. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak termaksud adalah antara lain: (1) Lebih dari 150 negara diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. (2) Hampir 80% pekerja ekonomi informal dunia (1,6 miliar orang) telah menghadapi penguncian dan pelambatan Covid-19. (3) Sebanyak 73 juta lebih orang bisa hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2020, dibandingkan sebelum krisis. (4) 18 juta lebih orang dalam kemiskinan ekstrim. (5) Skala tantangan pembiayaan untuk negara berkembang diukur dalam triliunan Dolar AS. (6) Ketidakpastian yang sangat tinggi tentang kedalaman dan durasi krisis.

Selanjutnya dampak Pandemi Covid-19 berisiko meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Meningkatnya ketimpangan dapat dilihat dari pekerjaan dengan bayaran lebih rendah kurang dapat diterima untuk pekerjaan berbasis rumahan (*work for home*). Sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan di rumah di negara-negara kaya. Ada juga kesenjangan gender - diperkirakan 52% wanita melakukan interaksi tatap muka dalam pekerjaan mereka dibandingkan dengan 39% pria. Resiko meningkatkan kemiskinan dapat dilihat dari adanya indikasi bahwa Pandemi Covid-19 menghentikan trend penurunan tingkat kemiskinan. Sampai dengan Mei 2020 terdapat 1,63 juta miskin baru dibandingkan September 2019. Indikasi lain adalah meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 (sebelum Pandemi Covid-19) menurun ke 4,99%. Sampai dengan Mei 2020 terdapat

tambahan pengangguran sebanyak 1,76 pekerja (pada saat Pandemi Covid-19). Konsekuensi dari meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan tersebut, maka indikator kesejahteraan pada tahun 2021 akan diperbaiki dengan target sebagai berikut: (1) tingkat kemiskinan 9,2% - 9,7%, (2) tingkat pengangguran 7,7% - 9,1%, dan (3) Rasio Gini 0,377-0,379.

Selanjutnya Pandemi Covid-19 berdampak secara luas dalam berbagai bidang. Dampak termaksud adalah: (1) Inklusi (*Inclusion*): semua jenis (formal dan informal) dan skala usaha (ultra mikro, mikro, kecil, menengah, besar) terdampak. Usaha informal mikro dan usaha kecil menengah (UKM) terdapat signifikan. (2) Ketahanan (*Resilience*): Sektor Pariwisata Perjalan, Ritel dan Manufaktur yang paling terpukul atau terdampak. Tenaga kerja perempuan terlibat dalam kegiatan sektor-sektor tersebut cukup signifikan. (3) Daya Saing (*Competitiveness*): Pandemi Covid-19 mempercepat pergeseran jaringan rantai global (GVC) di seluruh wilayah dunia. (4) Keberlanjutan (*Sustainability*): Pentingnya menjaga stabilitas keuangan, keandalan, dan solusi teknologi finansial (*financial technology*).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan agenda pertumbuhan inklusif. Pertama, Kebijakan perlu memperhitungkan dampak diferensial yang menimbulkan risiko kemiskinan dan ketidaksetaraan yang besar. Kedua, sebelum berbicara tentang Pertumbuhan Inklusif - kurangi peningkatan ketidaksetaraan dalam tahap bantuan dan restrukturisasi (penargetan kebijakan) dan lindungi modal manusia. Ketiga, apa yang kita lakukan dalam jangka pendek penting untuk agenda pertumbuhan inklusif jangka panjang dalam fase pemulihan. Akhirnya, perlunya kebijakan dan pendekatan inovatif, serta penggunaan teknologi digital dalam jangka pendek dan menengah.

Selanjutnya terdapat 4 pilar dan 3 tahapan yang memberikan dukungan terhadap agenda pertumbuhan inklusif. Keempat pilar termaksud: (1) Menyelamatkan nyawa (*save lives*). (2) Melindungi orang miskin dan paling rentan. (3) Memastikan pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. (4) Memperkuat kebijakan, lembaga, dan investasi untuk membangun kembali yang lebih baik. Sedangkan 3 tahapan, yaitu: (1) bantuan (relief), (2) restrukturisasi (*restructuring*), dan (3) pemulihan ketahanan (*resilience recovery*). Tahapan bantuan mencakup darurat kesehatan publik (*public health emergency*), bantu-

an sosial (*social emergency*), bantuan ekonomi (*economic emergency*), dan mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang (*maintaining focus on long term goals*). Kemudian tahapan restrukturisasi mencakup restrukturisasi sistem kesehatan (*restructuring health system*), memulihkan modal manusia (*restoring human capital*), restrukturisasi perusahaan dan penyelesaian hutang (*firms restructuring and debt resolution*), serta kebijakan dan reformasi kelembagaan (*policy and institutional reform*). Tahapan yang ketiga pemulihan yang tangguh (*resilient recovery*) yang mencakup sistem kesehatan yang siap menghadapi pandemi (*pandemic ready health systems*), membangun ekuitas dan inklusi (*building equity and inclusion*), pertumbuhan bisnis hijau dan penciptaan lapangan kerja (*green business growth and job creation*), dan investasi untuk membangun kembali dengan lebih baik (*investment to rebuild better*).

Untuk memitigasi risiko peningkatan ketidaksetaraan dan hilangnya generasi dalam tahap bantuan, restrukturisasi dan pemulihan. Ada tiga contoh mitigasi risiko dimaksud. Pertama, *Saving Lives: Respon Kesehatan*. Respon dalam bentuk bantuan: pengujian, penelusuran dan penahanan; protokol; APD; air dan sanitasi di fasilitas kesehatan dan hot spot (penggunaan informasi mobilitas, AI; berbasis komunitas / jaringan; pabrik garmen yang digunakan kembali, hotel dan pekerja layanan). Bentuk lain adalah upaya Restrukturisasi: kelangsungan Pelayanan Kesehatan non Covid (pelayanan kesehatan ibu, imunisasi, PTM lain: TB, Malaria); memobilisasi kemitraan dan investasi: akses yang adil dan merata (termasuk vaksin). Bentuk Pemulihan: memperkuat fungsi kesehatan inti dan kesiapsiagaan pandemi; akses ke layanan kesehatan dan inovasi (*telemedicine*); satu sistem kesehatan (sistem pangan dan kesehatan). Pembelajaran penting lainnya (institusi): pentingnya kepemimpinan politik, komunikasi yang jelas, kepercayaan dan kepercayaan, peran komunitas (perubahan perilaku).

Contoh mitigasi risiko kedua adalah dengan Melindungi orang miskin dan paling rentan. Melalui pemberian bantuan sosial: uang tunai dan transfer natura (lebih fokus perkotaan daripada perdesaan, penargetan luas, diperluas); pengembangan berbasis komunitas, perubahan perilaku dan kepedulian sosial, pembelajaran berkelanjutan (dari radio dan TV ke internet dan online). Kembalikan sumber daya manusia: bantuan tunai dan barang, uang tunai untuk bekerja (memastikan perempuan juga dapat berpartisipasi), inklusi produktif: rantai pasokan makanan, melindungi pekerjaan, mikro/informal, membuka kembali sekolah, pro-

gram pembelajaran inklusif. Pemulihan: bantuan sosial yang lebih kuat (*digital*); ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan; keseimbangan antara dukungan pendapatan, mata pencaharian dan layanan perawatan sosial; membangun kembali dan berinovasi pendidikan dan pembelajaran: anak-anak, keterampilan dan kemampuan kerja dan melindungi orang miskin dan paling rentan.

Contoh ketiga adalah Pembelajaran dan inovasi kelembagaan. Terkait dengan perlindungan orang miskin dan paling rentan maka pembelajaran dan inovasi kelembagaan menjadi hal yang penting. Beberapa hal termaksud adalah adanya data. Data adalah kunci dan ID digital terkait dengan sistem pembayaran dan seluler (tumpukan dasar) - pemberian bantuan sosial dan dapat untuk kelompok sasaran. Ketiadaan data, tanpa sistem pencatatan sosial dan sebagainya, penggunaan basis data apa pun yang ada untuk memetakan masalah. Pikirkan kembali bantuan sosial dan penyampaiannya, apa yang berhasil dan tidak berhasil, dan penargetan yang luas daripada sempit, pembaruan dinamis dari daftar sosial. Dapat juga digunakan data - dari kesehatan (kontak, penelusuran dan penahanan), bantuan sosial untuk bantuan ekonomi lainnya dan tujuan peningkatan keterampilan - dan mempercepat pembangunan digital.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kita menyadari COVID-19 menggagalkan agenda 2030, meningkatkan ketidaksetaraan dan menurunkan prospek pertumbuhan. Semua negara di Kawasan Asia Timur Pasifik telah menerapkan berbagai paket stimulus. Selama fase restrukturisasi saat ini, penting bagi negara-negara untuk mencegah ketidaksetaraan yang lebih besar (dampak diferensial) dan mempertahankan pekerjaan, serta menerapkan kebijakan yang menargetkan kelompok, menggunakan inovasi (data, teknologi) dan semua institusi (seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah). Selama fase pemulihan tangguh yang akan datang, penting untuk menerapkan kebijakan yang meningkatkan produktivitas dengan cara yang inklusif dan dalam skala besar untuk mendorong pemulihan yang inklusif dan tangguh.



Ringkasan Eksekutif:
PEMULIHAN SEKTOR RIIL DAN
KETENAGAKERJAAN SECARA INKLUSIF

Rosan Roeslani (Ketua KADIN Indonesia)
Plenary Speaker, Sidang Pleno ISEI XXI & Seminar
Nasional 2020

Indonesia adalah salah satu negara paling optimis di dunia, dengan pemulihan yang cepat Pascacovid-19. Di sisi lain, harus diakui perekonomian Indonesia terdampak Pandemi Covid-19. Dampak termaksud diantaranya kinerja perdagangan dengan mitra utama, Cina, Jepang, AS, Singapura dan sebagainya, mengalami penurunan selama periode Januari–Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berkisar antara 2% sampai 20%. Dampak Pandemi Covid-19 yang lain adalah pertumbuhan negatif atau minus sektor-sektor perekonomian yang mempunyai kontribusi penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Sektor-sektor tersebut antara lain transportasi (-30,84%), akomodasi dan makan minum (22,02%), jasa perusahaan (12,09%), perdagangan (7,57%), dan industri pengolahan (-6,19%). Pertumbuhan negatif tersebut terjadi dalam Triwulan II-2020 (*year on year, yoy*).

Untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, Dunia Usaha, dan Pemerintah Daerah (Pemda) dibutuhkan biaya sebesar Rp695,2 trilyun. Selanjutnya biaya penanganan dampak Pandemi Covid-19 tanpa memasukkan biaya kesehatan mencapai Rp 607,65 trilyun. Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dapat dikelompokkan menjadi sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Dari sisi permintaan disalurkan melalui PKH, Sembako, Bansos, Pra Kerja, Diskonh Listrik, Logistik/Pangan/Sembako, BLT Dana Desa dan Insentif perumahan bagi MBR kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria. Biaya dari sisi permintaan mencapai Rp 205,20 trilyun. Selanjutnya dari sisi penawaran disiapkan anggaran sebesar Rp 402,45 trilyun. Biaya tersebut disalurkan bagi dunia usaha, khususnya Ultra Mikro dan UMKM, Korporasi, BUMN dan Pemda.

Kemajuan pelaksanaan penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Program PEN dari sisi belanja secara umum masih menghadapi tanta-

ngan di level operasional dan proses administrasi. Hal ini terkait dengan skala yang cukup besar (nilai dan sasaran *beneficiaries*) dan tetap menjaga akuntabilitas. Sampai dengan awal Agustus 2020, realisasi anggaran belanja relative rendah. Realisasi belanja Kesehatan (7,83%), Perlindungan Sosial (46,60%), Sektor K/L dan Pemda (8,84%), Insentif Usaha (13,43%), UMKM 926,39%), dan Pembiayaan Korporasi (0,00%). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya UMKM menyumbang hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018 atau sekitar 57,8% dari total PDB Indonesia. Selain itu, UMKM memberikan mempekerjakan sebanyak 116.978.631 orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar). Sampai saat ini, UMKM Indonesia sebanyak 64.194.057 unit atau mencapai 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Nilai ekspor produk UMKM pada tahun 2018 sekitar 14,5% dari total ekspor Indonesia. Kemenkop dan UMKM (2019), berharap kontribusinya meningkat menjadi 30% pada tahun 2024.

Pandemi COVID-19 memukul UMKM di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei ADB (2020), dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia antara lain: 48,6 persen dari total UMKM di Indonesia melakukan penutupan usaha dengan seketika; 30,5 persen mengalami penurunan permintaan domestik; 19,8 persen dari total UMKM di Indonesia mengalami gangguan produksi/rantai pasokan; 14,1 persen mengalami pembatalan kontrak. Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap penjualan dan pendapatan UMKM di Indonesia. Dampak terhadap penjualan tersebut adalah (ADB, 2020): Tutup sementara (49,3%); Turun lebih dari 30% (37,7%); Turun 21% sampai 30% (4,4%); Lainnya (8,6%). Sedangkan dampak terhadap pendapatan UMKM adalah: Tutup sementara (48,8%); Turun lebih dari 30% (37,9%); Turun 21% sampai 30% (4,4%); Lainnya (8,9%).

Mulai Juni 2020, beberapa indikator domestik mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari normal atau sebelum Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, transportasi udara, angkutan laut dan angkutan kereta api yang meningkat dibandingkan pada bulan Mei 2020. Indikator Manufacturing (PMI) Indonesia pada bulan April, Mei, dan Juni 2020 adalah yang terburuk selama 6 tahun terakhir. Kondisinya mulai membaik pada bulan Juli 2020 dan lebih baik dibandingkan Maret 2020. Meski-

pun demikian, nilainya masih rendah dibandingkan sebelum Pandemi Covid-2019.

Selanjutnya Pandemi Covid-19 dan perang dagang antara AS dan Cina memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan internasional untuk tidak terlalu bergantung kepada ekonomi Cina. Uni Eropa dan AS secara eksplisit sudah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan relokasi pabrik dari Cina sebagai bagian dari diversifikasi industri global. Sejumlah perusahaan akan tetap mempertahankan operasinya di wilayah Asia sehingga negara-negara ASEAN menjadi salah satu opsinya (Oxford Business Group, 2020). Untuk mengambil peluang ini, maka sejumlah aspek perlu diperbaiki, antara lain: Kemudahan berbisnis; Fiscal regime (*administration, tax rate, dan tax incentive*); Ketersediaan lahan untuk menampung relokasi pabrik; Kebijakan perdagangan yang sejalan dengan tren *Global Value Chain (GVC)*. Menyambut peluang relokasi pabrik dari Amerika Serikat, Cina dan negara lainnya, ternyata Indonesia kalah siap dari negara-negara tetangga ASEAN. Mereka jauh sebelum Pandemi Covid-19, telah melakukan reformasi struktural dengan pemangkasan perizinan sehingga lebih siap melakukan recovery pascapandemi.

Sebagai catatan penutup dapat disampaikan bahwa simplifikasi dan harmonisasi regulasi serta perizinan sebagai ruh dari RUU Cipta Kerja. Kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi (UU, PP dan sebagainya) yang terlalu banyak, tumpang tindih, dan sebagian bertentangan. Manfaat RUU Cipta Kerja adalah: (1) menghilangkan tumpang tindih regulasi, (2) efisien proses pencabutan atau perubahan regulasi, dan (3) menghilangkan ego sektoral. Tiga Prioritas untuk mencapai ekonomi yang kuat Pascakrisis Covid-19: (1) Membangun jalan ekonomi baru, dengan mendorong peningkatan daya saing melalui digital, inovasi, dan kewirausahaan serta memanfaatkan peluang ekonomi baru. (2) Membangun dan memperkuat kapabilitas ekonomi, yang terdiri meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas bisnis, dan meningkatkan kualitas kelembagaan sektor publik. (3) Membangun ketahanan ekonomi dan sosial melalui membangun ketahanan ke dalam struktur ekonomi baik sektor riil maupun keuangan dan mengambil peluang untuk reformasi kebijakan yang sudah lama terbengkalai lewat momentum krisis: "*bad times, good policies*".





Ringkasan Eksekutif:
**UPAYA MENDORONG EKONOMI INKLUSIF:
PERSPEKTIF PERBANKAN**

Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur BCA)
Plenary Speaker, Sidang Pleno ISEI XXI & Seminar
Nasional 2020

Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua komponen perekonomian. Dampak termaksud pertama, melemahnya konsumsi masyarakat dengan indikasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan jam kerja, dan merumahkan sementara yang mengakibatkan menurunnya pendapatan sehingga daya beli masyarakat juga melemah. Berdasarkan data BPS (2020), konsumsi rumah tangga menurun 5,51% (*year on year, yoy*) pada kuartal II-2020. Menurunnya pendapatan pajak akibat menurunnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan anggaran untuk stimulus terbatas sehingga penyaluran stimulus ekonomi menjadi terhambat. Menurut data BPS (2020), belanja pemerintah turun 6,90% (*yoy*) pada kuartal II-2020. Kedua, menurunnya investasi (asing dan domestik) kondisi tersebut disebabkan menurunnya permintaan pasar dan keyakinan prospek bisnis di masa depan yang masih belum terlalu jelas. Data BPS (2020) menunjukkan terjadi penurunan investasi sebesar 8,61% (*yoy*) pada kuartal II-2020. Ketiga, terjadi penurunan ekspor namun ekspor bersih (*net export*) meningkat, hal tersebut dengan terkait dengan kondisi ekonomi global. Untuk Indonesia meskipun permintaan ekspor melambat namun di sisi lain penurunan ekspor lebih cepat sehingga terjadi peningkatan ekspor bersih. Terjadi penurunan ekspor sebesar 11,66% pada kuartal II-2020 (BPS, 2020). Sampai dengan kuartal II-2020 terjadi penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,32% (*yoy*), Pada periode yang sama pada tahun 2019 perekonomian tumbuh sebesar 5,05%.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada melemahnya realisasi penyaluran kredit perbankan. Realisasi termaksud sampai dengan kuartal II-2020 di bawah target. Berdasarkan data Bank Indonesia (2020), dalam periode tersebut realisasi kredit hanya mencapai 9,1% dari target. Ter-

kait dengan kondisi perekonomian yang terdampak Pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan stimulus baik fiskal dan non fiskal. Upaya memperbaiki kinerja perekonomian dilakukan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah anggaran untuk Program PEN mencapai Rp 641,1t trilyun.

Selanjutnya stimulus ekonomi melalui Program PEN harus dicermati dalam dua hal. Pertama, stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memunculkan resiko Current Account Defisit (CAD). Hal tersebut jika terjadi jika stimulus diberikan bagi UMKM sub-sektor Perdagangan yang cenderung melakukan impor. Risiko tersebut dapat dikurangi jika alokasi stimulus lebih diarahkan bagi UMKM yang produktif dan berorientasi ekspor. Untuk itu diperlukan kebijakan dan upaya pemberdayaan melalui digitalisasi dan peningkatan kemampuan serta keterampilan (*upskilling*) sumberdaya manusia UMKM. Kedua, stimulus perlu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek (*short term*) dan resiko atau strategi jangka panjang (*long term*). Idealnya, stimulus bisa meng-address sisi demand (eksekusi cepat, mass employment), tapi juga *supply* (meningkatkan kapasitas produksi. *Cash for work* dan *industrial policy* jadi solusi yang memenuhi kriteria tersebut.

Pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan momentum untuk mendorong kembali proses industrialisasi. Sulit sekali industrialisasi berjalan tanpa dorongan pemerintah. Peran atau kontribusi pemerintah tersebut mencakup: (1) Memfasilitasi transfer teknologi dan ilmu dari luar, khususnya *Foreign Direct Investment (FDI)*. (2) Mengalihkan Mengalihkan dana nasional untuk industrialisasi secara massif (*financial repression*). (3) Pemerintah merancang strategi industri secara jangka panjang (*industrial planning*) yang mencakup proses teknokratis, insentif dan dukungan langsung, insentif berdasarkan kinerja dan melindungi *infant industry*. (4) Kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kondisi pada saat Pandemi Covid-19. Intervensi kebijakan dilaksanakan baik pada saat penanganan pandemic dan sudah vaksin dan obat Covid-19.

Selanjutnya strategi yang komprehensif untuk memastikan pemulihan terjadi secara inklusif. Strategi termaksud dapat dilaksanakan dengan cara *unbalanced recovery* dan *balanced recovery*. Dengan *unbalanced recovery* dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan penjual/produsen melalui bantuan sosial atau bantuan tunai serta kredit UMKM. Kemudian *balanced recovery* dilakukan melalui: (1)

unbalanced recovery, (2) pemerintah memberikan dukungan kebijakan kepada industri manufaktur, dan (3) dukungan digitalisasi untuk UMKM. Digitalisasi UMKM digunakan sebagai platform untuk menghubungkan UMKM lokal dengan pasar lokal dan pasar nasional atau global. Agar proses digitalisasi, baik dengan platform online dan *platform offline*, UMKM dapat berjalan lebih cepat maka diperlukan dukungan Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Perbankan. Dengan dukungan tersebut maka UMKM lokal dapat memperoleh akses menjual produknya di pasar global atau internasional. Untuk mendukung percepatan digitalisasi UMKM, diperlukan ekosistem yang bersifat mutualisme antara e-commerce dan pelaku usaha domestik. Ekosistem termaksud membutuhkan dukungan pemerintah, industri besar dan perbankan. Dukungan pemerintah dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal, termasuk insentif logistik. Industri besar dapat memberikan dukungannya melalui program kemitraan dengan UMKM. Dukungan perbankan dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia serta kerjasamanya dengan UMKM. Perbankan juga dapat mendorong percepatan digitalisasi UMKM, khususnya pembayaran digital melalui *e-commerce* misalnya QRIS. Selanjutnya e-commerce masih bertumbuh dan bisa di-leverage untuk mendorong kinerja usaha domestik.

Sebagai catatan penutup, dapat disimpulkan bahwa stimulus pemerintah memegang peranan kunci untuk menutupi output gap dan mencegah potensi krisis lanjutan. Relaksasi bagi perbankan membantu terjaganya kondisi likuiditas dan risiko kredit bank, tapi penyaluran kredit masih terhambat dari sisi demand sektor riil (akibat prospek bisnis yang belum pasti). UMKM Indonesia didominasi oleh sektor perdagangan. Over-stimulus di sektor UMKM bisa saja memicu peningkatan impor. Pemerintah perlu mendorong UKM manufaktur dan meningkatkan kapasitas UMKM via digitalisasi dan up-skilling SDM-nya. Untuk mencegah efek samping tersebut, stimulus harus juga memperkuat produktivitas ekonomi (*supply-side*), termasuk lewat *cash for work*, proyek infrastruktur, *food estate*, dan *industrial policy* (termasuk hilirisasi, substitusi impor dan kemitraan industri besar dan UMKM). Digitalisasi sebagai upaya menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, maupun domestik atau internasional. Dukungan dari stakeholders lain - seperti *upskilling* UMKM-menjadi faktor pendukung penting. *Ø*bisa di-leverage untuk mendorong kinerja usaha domestik secara inklusif ditengah pandemi, namun risiko peningkatan impor perlu diwaspadai.





**RUMUSAN HASIL SIDANG PLENO ISEI XXI
DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

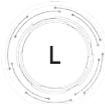


RUMUSAN HASIL SIDANG PLENO ISEI XXI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan ke-2 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut mengalami kontraksi sebesar -5.32% (*year-on-year*) dan jauh lebih rendah dibandingkan periode triwulan pertama tahun 2020 yang sebesar 2.97% (*year-on-year*). Berdasarkan data pengeluaran, aktivitas konsumsi mengalami kontraksi (termasuk pengeluaran pemerintah), demikian pula terhadap aktivitas investasi & ekspor. Dari sisi sektor usaha, pertumbuhan yang paling tinggi dicatatkan oleh sektor Infokom, sementara yang paling terkontraksi adalah sektor Transportasi

Pandemi Covid-19 berdampak pula pada peningkatan jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dalam jangka panjang berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan. Sampai dengan 31 Juli 2020, jumlah secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Tiga provinsi dengan pekerja yang paling terdampak Covid-19 diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat (342.772 orang pekerja), DKI Jakarta (320.114 orang pekerja), dan Jawa Tengah (263.980 orang pekerja). Dalam jangka panjang kondisi tersebut akan berdampak pada angka kemiskinan.

Di sisi lain, sejumlah data menunjukkan pergerakan ekonomi. Hal tersebut terkait dengan berjalannya Program PEN dan Adaptasi Kebiasaan Normal. Sejumlah indikator pada bulan Juni 2020 mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi seperti PMI manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, dan Penjualan Mobil dan Survey Kegiatan Usaha. Kondisi tersebut didukung oleh Tren Perbaikan Kinerja Sektor Indeks Saham Indonesia Perbaikan kinerja juga terjadi pada saham di sektor *Consumer Good Industry, Mining, Finance* dan *Manufacture*, sejak April 2020. Sementara kinerja saham pada sektor *Property, Real Estate, and Building Construction* masih terus tertekan.



Kondisi lain yang mendukung pergerakan ekonomi adalah surplus neraca perdagangan pada Juli 2020 yang merupakan tertinggi sejak 9 tahun terakhir. Neraca perdagangan pada Juli 2020 mengalami surplus USD3,26 Miliar. Didorong oleh membaiknya kinerja ekspor khususnya ekspor non-migas dan menurunnya permintaan impor.

Terkait dengan kebijakan penanggulangan Pandemi Covid-19, setidaknya memperhatikan tiga tahapan, yaitu: *relief*, *restructuring*, dan *recovery*. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan 2 langkah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, yaitu: (1) Menjaga kehidupan (kesehatan) (*Safeguard Our Lives*) yang mencakup: memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, produksi dan distribusi vaksin. (2) Menjaga Pencapaian kehidupan (*Safeguard Our Livelihood*) yang mencakup: mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali bekerja produktif dan aman, menyiapkan kebijakan untuk pemulihan dan bahkan untuk berlari kembali.

Selanjutnya, peran institusi sangat penting terutama komunikasi publik yang memadai untuk meningkatkan "*trust*" dalam masyarakat luas dalam menerapkan berbagai kebijakan publik. Data yang kredibel merupakan kunci keberhasilan berbagai kebijakan publik dalam tiap tahapan *relief*, *restructuring* dan *recovery*.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian (2020), anggaran/biaya penanganan Pandemi Covi-19 pada tahun 2020 mencapai Rp 695,20 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menangani Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Dunia Usaha, dan Pemda. Sedangkan biaya atau anggaran penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 telah direncanakan sebesar Rp 365,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut.

Tiga Prioritas untuk mencapai ekonomi yang kuat Pascakrisis Covid-19: (1) Membangun Jalan Ekonomi Baru, dengan mendorong peningkatan daya saing melalui digital, inovasi, dan kewirausahaan serta memanfaatkan peluang ekonomi baru. (2) Membangun dan Memperkuat Kapabilitas Ekonomi, yang terdiri meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas bisnis, dan meningkatkan kualitas kelembagaan sektor publik. (3) Membangun Ketahanan Ekonomi dan Sosial melalui membangun ketahanan ke dalam struktur ekonomi baik sektor riil mau-

pun keuangan dan mengambil peluang untuk reformasi kebijakan yang sudah lama terbengkalai lewat momentum krisis: “*bad times, good policies*”.

Stimulus pemerintah memegang peranan kunci untuk menutupi output gap dan mencegah potensi krisis lanjutan. Relaksasi bagi perbankan membantu terjaganya kondisi likuiditas dan risiko kredit bank, tapi penyaluran kredit masih terhambat dari sisi demand sektor riil (akibat prospek bisnis yang belum pasti). UMKM Indonesia didominasi oleh sektor perdagangan. *Over-stimulus* di sektor UMKM bisa saja memicu peningkatan impor. Pemerintah perlu mendorong UKM manufaktur dan meningkatkan kapasitas UMKM via digitalisasi dan up-skilling SDM-nya. Dengan kondisi tersebut maka penyaluran kredit perbankan untuk UMKM akan menjadi lebih lancar.

Transformasi adalah kunci untuk bisa melewati proses pemulihan dari Covid 19 dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari lingkungan strategis yang berkembang dengan cepat dan memerlukan respon segera. Di antara lingkungan strategis yang berubah tersebut antara lain: (1) Dalam jangka pendek, krisis akan merubah agenda transformasi kebijakan ekonomi maupun ketenagakerjaan, dari yang sebelumnya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, menjadi menghindari PHK tenaga kerja dan melindungi pendapatan mereka. (2) Beberapa saluran yang bisa meningkatkan produktivitas (perdagangan, sumber daya manusia, daya saing, dan stabilitas makro ekonomi) kini berada dalam tekanan dan justru perlu dukungan. (3) Masyarakat yang rentan justru paling awal mendapat tekanan, yakni masyarakat miskin, kaum perempuan dan negara berpendapatan rendah.

Mengingat besarnya potensi UMKM terhadap perekonomian nasional, upaya penyelamatan terhadap UMKM seharusnya tidak berorientasi dalam jangka pendek, namun juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kinerja makroekonomi dan daya saingnya secara global terutama di era digitalisasi. UMKM kita yang saat ini dominan baru sebagai reseller dari produk-produk impor berpotensi membawa tekanan pada neraca perdagangan internasional, selain juga mempunyai nilai tambah yang rendah karena lebih bergantung pada sektor perdagangan. Idealnya, UMKM kita dapat lebih berorientasi pada sektor industri manufaktur dan *global value chain (GVC)* sehingga dapat menghasilkan devisa (surplus perdagangan), selain tentunya bersifat inklusif dalam

hal penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi *informal economy*. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan yang menjadi pegangan utama pengambil kebijakan di mada Pandemi Covid. Dalam praktek di lapangan tidak mudah, dikarenakan terkait dengan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan (3M, 3T, dan 3S) masih belum optimal. Implementasi penerapan protokol yang ketat dan optimal dapat menjadi salah satu kunci efektivitas kebijakan di bidang ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memperbanyak test kesehatan (3T) agar masyarakat dapat meminimalkan ketidakpastian sehingga mengurangi rasa khawatir/ketakutan terhadap virus Coronan. Kedua, kesehatan adalah modal yang paling penting dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan modal yang lain, seperti misalnya modal finansial dan sumber daya alam. Ketiga, kebijakan terkait untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 harus semakin inklusif agar dapat menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Di samping itu, kebijakan untuk menyelamatkan sumber daya manusia (*human capital*) juga sangat penting agar dapat mencegah terjadinya kehilangan generasi yang sehat dan memiliki pendidikan yang memadai.

**ABSTRAK ARTIKEL PEMENANG
*CALL FOR PAPERS***





GLOBALISISASI DAN DAYA SAING USAHA





*IDENTIFYING EQUILIBRIUM CREDIT GROWTH RESPONSE TO
POLITICAL EVENT AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS SHOCKS*

Rozy Ahimsyah Pratama
Universitas Gadjah Mada
dewa.sidan@pmbms.ac.id

Edhie Purnawan
Universitas Gadjah Mada
edhiepurnawan@ugm.ac.id

ABSTRACT

Credit is an important instrument in a country to stimulate economic growth. This study aims to analyze the impact of political events and the global financial crisis on Indonesia's domestic credit growth. the instrument used to achieve the research objectives is to use the impulse response function. The findings of this study are that political events and crisis situations have a significant negative effect on credit growth in Indonesia.

Keywords: credit, political events, global financial crisis, impulse response,

JEL Classification: E51, H12, G18



PEMETAAN *INTELLECTUAL CAPITAL* INDUSTRI KREATIF SENI PERTUNJUKAN DI JAWA TIMUR

Gendut Sukarno

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
sukarnogendut@yahoo.co.id

ABSTRACT

A tight competition in the industry 4.0 does not only take place in the world of industry and trades, but also in the field of creative business or precisely creative industry. Problems in the management of Small and Medium Enterprises (SMEs) and creative industries that have not been resolved is the problem of intellectual capital. One of the approaches used in assessment and measurement of knowledge asset is Intellectual Capital consisting of 3 major elements namely Human Capital, Structural Capital, and Relational Capital. Creative industry is an industry with its own uniqueness and emphasizes on creativity, innovation and utilization of individual skills need more management. The objective of this study is to study the concept of Intellectual capital of creative industry in East Java that has the dimension of Human Capital; Structural Capital as well as Relational Capital. The sample in this study are owners/managers/leaders of performing arts creative industry sub-sector in 9 cities in East Java (Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Batu, Malang, Kediri, Blitar, and Madiun) with a sample of 45 as respondents. The analysis technique used in this research is Partial Last Square (PLS). Based on the research result, it shows that intellectual capital has not been able to make a significant contribution to the performance of the performing arts creative industry in East Java.

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Relational

ABSTRAK

Dalam revolusi industri 4.0 ini, persaingan tidak saja terjadi di dunia industri dan perdagangan, tapi juga berlaku bagi usaha kreatif atau yang lebih khususnya industri kreatif. Problem dalam pengelolaan UKM dan industri kreatif yang belum teratasi adalah masalah *Intellectual capital*. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran *knowledge asset* (aset pengetahuan) tersebut adalah *Intellectual Capital* yang terdiri dari 3 elemen utama yaitu *Human Capital*, *Structural Capital*, dan *Relational Capital*. Industri kreatif merupakan industri yang mempunyai keunikan dan lebih menekankan kreatifitas, inovasi dan pemanfaatan bakat individu perlu mendapatkan pengelolaan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep *Intellectual capital* industri kreatif di Jawa Timur yang mempunyai dimensi *Human Capital*; *Structural Capital* serta *Relational Capital*. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik/pengelola/pimpinan sub sector industri kreatif seni pertunjukan yang berada di 9 kota di Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Batu, Malang, Kediri, Blitar, dan Madiun) dengan sampel sebanyak 45 sebagai responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Last Square (PLS)*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* belum mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap kinerja industri kreatif seni pertunjukan di Jawa Timur.

Kata kunci : *Intellectual Capital*, *Human Capital*, *Structural Capital*, *Relational*

**ANALYSIS OF DOMESTIC CREDIT GROWTH IN INDONESIA
THROUGH VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND
HODRICK-PRESCOTT FILTER APPROACH**

Rozy Ahimsyah Pratama
Universitas Gadjah Mada
rozyahimsyah45@gmail.com

Muhammad Edhie Purnawan
Universitas Gadjah Mada
purnawan@ugm.ac.id

Indah Septiana Putri
Universitas Gadjah Mada
putriindahseptiana@gmail.com

ABSTRACT

The availability of domestic credit facilities allows alternative sources of funding that can be used by companies to invest and households to make consumption that cannot be done with their own funds. This study aims to analyze the variables that affect domestic credit in Indonesia through the vector error correction model approach and analyze domestic credit trends through the Hodrick-Prescott filter approach. The findings of this study indicate that the exchange rate, consumer tendency index, minimum reserve requirement, and political events affect domestic credit in the short term while the reference interest rate, political events, and minimum reserve requirement affect domestic credit in the long run. The impulse response function analysis states that the consumer tendency shock index is the most sensitive variable responded by the domestic credit variable. Estimates through the Hodrick-Prescott filter approach show that domestic credit growth is in the long-term trend of one standard deviation.

Keywords: domestic credit, political events, consumer tendency index, interest rates, global crisis

JEL Classification: E43, E47, E52



DAMPAK KEBIJAKAN TARIF TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
DI INDONESIA: *GLOBAL TRADE ANALYSIS PROJECT (GTAP)*
ANALYSIS

Kartini

Universitas Gadjah Mada
tini.031196.kt@gmail.com

Silvia Margaret

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This paper aims to see the impact of the policy on the imposition of tariffs on the agriculture sector in Indonesia. The GTAP model is implemented. This study looks at the impact on GDP, trade balance, welfare, terms of trade, aggregate imports, aggregate exports, world trade patterns, and changes in the labor sector in Indonesia. The policy simulation results predict an increase in GDP, trade balance, welfare, and terms of trade under the second simulation. Other predictions also explain that aggregate imports, aggregate exports, world trade, and changes in the labor sector have a positive impact under the first simulation. So it can be concluded that the tariff policy taken depends on the main objectives a country wants to achieve.

Keywords: Trade Policy, Tariff, GTAP Model, CGE Analysis

JEL Classification: F13, F47, C68

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk melihat dampak yang ditimbulkan adanya kebijakan pengenaan tarif pada sektor agriculture di Indonesia. Model GTAP diimplementasikan. Penelitian ini melihat dampak yang ditimbulkan pada PDB, trade balance, kesejahteraan, *term of trade*, *aggregate import*, *aggregate export*, pola perdagangan dunia, dan perubahan pada sektor tenaga kerja di Indonesia. Hasil simulasi kebijakan memprediksi peningkatan pada PDB, *trade balance*, kesejahteraan, dan *term of trade* dibawah simulasi kedua. Prediksi lainnya juga menjelaskan bahwa *aggregate import*, *aggregate export*, perdagangan dunia, dan perubahan pada sektor tenaga kerja memiliki dampak positif di bawah simulasi pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif yang diambil tergantung pada tujuan utama yang ingin diperoleh oleh suatu negara.

Kata kunci: Kebijakan perdagangan, Tarif, Model GTAP, Analisis CGE

**KEUANGAN NEGARA, INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN**





DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DISABILITAS TERHADAP PARTISIPASI DAN UPAH KERJA DI INDONESIA

Ririn Nopiah

Universitas Gadjah Mada
economicsririn@gmail.com

Evita Hanie Pangaribowo

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Reductions on supply of labor and wages occur to people with disabilities. Disability conditions cause decline in productivity so that the probability of being labor is small, risk of unemployment, and loss of income. The high prevalence of disabilities in Indonesia causes inequality of labor participation and economic deprivation. This study aims to analyze the socio-economic on labor participation and wages to disabilities in Indonesia based on type of disability. The data used is Indonesia Family Life Survey (IFLS) waves 4 and 5 by pooled cross-section. The analysis methods are logit and tobit models. The results showed that communicative disabilities have higher chance of labor participation and wages. Factors of degree of severity, age, male, head of household, education, urban, chronic disease, ownership of insurance, and ownership of assets also affect labor participation and wages of disabilities. The labor activation program to disabilities is a succession and initiative as welfare reform, poverty alleviation and an indicator of inclusive development.

Keywords: People with disabilities, Labor Participation, Wages, Logit, Tobit

ABSTRAK

Pengurangan pasokan tenaga kerja dan upah kerja terjadi pada kelompok penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas menyebabkan penurunan produktivitas kerja sehingga probabilitas kecil untuk dipekerjakan, risiko pengangguran, dan hilangnya pendapatan. Tingginya prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia menyebabkan ketidakmerataan partisipasi kerja dan perampasan ekonomi yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosial ekonomi terhadap partisipasi dan upah kerja disabilitas di Indonesia berdasarkan jenis disabilitas. Data yang digunakan adalah Indonesia *Family Life Survey (IFLS)* gelombang 4 dan 5 dengan *pooled cross-section*. Metode analisis adalah *logit* dan *tobit model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas komunikatif memiliki peluang lebih tinggi pada partisipasi kerja. Faktor derajat keparahan, usia, laki-laki, status kepala rumah tangga, pendidikan, urban, riwayat penyakit kronis, kepemilikan asuransi, dan kepemilikan aset juga mempengaruhi partisipasi dan upah kerja penyandang disabilitas. Program aktivasi kerja penyandang disabilitas merupakan upaya suksesi dan inisiatif sebagai reformasi kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan indikator keberhasilan pembangunan inklusi.

Kata Kunci : Penyandang disabilitas, Partisipasi Kerja, Upah Kerja, logit, tobit

**QUANTILE REGRESSION FOR PANEL DATA: THE INVESTIGATION
OF DETERMINANTS OF HOUSEHOLDS' NET WEALTH IN INDONESIA**

Thomas Soseco
Universitas Negeri Malang
thomas.soseco.fe@um.ac.id

ABSTRACT

This research investigates factors that affect households' net wealth. This research uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) from 1993 to 2014 with quantile regression analysis. Results from standard panel regression show the positive variables that contribute to net wealth are variable of household head is married, the household head is male, household head age, and household head length of study. While variable of household size has negative effect on households' net wealth. Observation from quantile regression leads to a variation of coefficients across deciles. Most noticeably, some variables have stronger effect in the lower deciles, i.e. variable of household head is married, household head is male, and household size. While other variables have stronger effect in higher deciles, i.e. variable of household head age and household head length of study.

*Keywords: Households, Net Wealth, Deciles, Quantile Regression
JEL Classification: C33, I31, J12, J13*



ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN POKOK RUMAH TANGGA DI INDONESIA TAHUN 2000-2014

Indrawan Firdauzi
Universitas Gadjah Mada
1ndrawanpirdauzi@gmail.com

ABSTRACT

Food is an essential issue that Indonesia faces every year. In addition to its enormous economic value to Gross Domestic Product (GDP), food also related to welfare, poverty and a decent standard of living for the community. So any changes in consumption patterns that occur in society can change the economy in Indonesia and the welfare of society as well. Therefore, this study aims to analyze food consumption patterns in Indonesia using pooled cross section data with a time span between 2000 and 2014. The method used in this study is the Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The analysis shows that the consumption pattern in Indonesia is still dominated by rice consumption. In addition, changes in income and changes in commodity prices are more responsive to poor households where when there is an increase in income their percentage of consumption will increase, and when there is an increase in commodity prices it will reduce their consumption massively.

Keywords: Food demand, QUAIDS, consumption patterns.

ABSTRAK

Pangan merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya. Selain nilai ekonominya yang sangat besar terhadap Produk Domesti Bruto (PDB), pangan juga berkaitan dengan kesejahteraan, kemiskinan dan standar hidup yang layak bagi masyarakat. Sehingga perubahan pola konsumsi yang terjadi di masyarakat dapat mengubah perekonomian di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi pangan di Indonesia menggunakan data *pooled cross section* dengan rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola konsumsi di Indonesia masih didominasi oleh konsumsi beras. Selain itu, perubahan pendapatan maupun perubahan harga komoditas lebih responsif pada rumah tangga miskin dimana ketika terjadi kenaikan pendapatan persentase konsumsi mereka akan meningkat, dan ketika terjadi kenaikan harga komoditas akan menurunkan konsumsi mereka secara besar-besaran.

Kata kunci: Permintaan pangan, QUAIDS, pola konsumsi.

Klasifikasi kode JEL: D11; D12; R2

MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM BERBASIS DIGITAL DI ERA NEW NORMAL MELALUI PENDEKATAN ANP

Irman Firmansyah
Universitas Siliwangi
irmanfirmansyah@unsil.ac.id

Wildan Dwi Dermawan
Universitas Siliwangi
wildan.dermawan@unsil.ac.id

Andri Helmi Munawar
Universitas Siliwangi
andri.helmi@unsil.ac.id

Dede Arif Rahmani
Universitas Siliwangi
dede.arif@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find solutions for MSMEs in East Priangan in increasing their competitiveness during the new normal which can be continued in normal conditions. MSMEs in East Priangan have great potential to be developed because there are many creative industries. The use of digital media is currently needed in order to grow and have high competitiveness in line with the development of the current era, namely the industrial revolution 4.0. The method used is a qualitative-quantitative Analytic Network Process approach with expert respondents consisting of academics, practitioners, researchers, and regulators who are familiar with the conditions of MSMEs in East Priangan. The results showed that the biggest problem of competitiveness of MSMEs from the internal side was the weak knowledge and ability to master technology, while from the external side, namely the weak purchasing power of the community. Then the solution that can be used is optimization of online media for marketing from the internal side, while from the external side, namely MSMEs, they must carry out collaboration with IT companies for online marketing.

Keywords: MSMEs, new normal, competitiveness, East Priangan, COVID-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi bagi UMKM di Priangan Timur dalam meningkatkan daya saingnya selama *new normal* yang dapat dilanjutkan di kondisi normal. UMKM di Priangan Timur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena banyak industri kreatif. Pemanfaatan media digital saat ini diperlukan agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing tinggi seiring dengan perkembangan era saat ini yaitu revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan adalah kualitatif-kuantitatif pendekatan *Analytic Network Process* dengan responden para pakar (*expert*) yang terdiri dari akademisi, praktisi, peneliti, dan regulator yang faham dengan kondisi UMKM di Priangan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah terbesar daya saing UMKM dari sisi internal adalah lemahnya pengetahuan dan kemampuan penguasaan teknologi, sedangkan dari sisi eksternal yaitu lemahnya daya beli masyarakat. Kemudian solusi yang dapat digunakan yaitu optimalisasi media online untuk pemasaran dari sisi internal, sedangkan dari sisi eksternal yaitu UMKM harus menjalankan kerjasama dengan perusahaan IT untuk pemasaran online.

Kata kunci: UMKM, *new normal*, daya saing, Priangan Timur, COVID-19

MAKRO EKONOMI, PASAR KEUANGAN DAN KEUANGAN SYARIAH





**DOES DAMAGE FROM NATURAL DISASTER AFFECT CHILD LABOR?
EVIDENCE FROM INDONESIA**

Tito Sulisty

Universitas Brawijaya
titosulistyo@student.ub.ac.id

Wildan Syafitri

Universitas Brawijaya
wildans@ub.ac.id

ABSTRACT

The existence of the disaster caused economic losses for the community with the cessation of economic and educational activities. In line with the deteriorating condition of the Indonesian economy, households are forced to adjust to a substantial decline in real income so it is feared that parents will be forced to withdraw children from school and send them to work as household buffer shocks. This paper examines the relationship between damage of natural disaster and child labor and also difference impact of disaster damage on child labor between urban and rural area. Using cross section data from Indonesia Family Live Survey wave 5 collected in 2014, we find evidence of a positive relationship between damage of natural disaster and child labor, and significant difference between urban and rural.

Keywords: child labor; natural disaster; disaster damage; urban; rural



**BEHAVIOUR OF STOCK RETURNS DURING COVID-19 PANDEMIC ;
EVIDENCE FROM SIX SELECTED STOCK MARKET IN THE WORLD**

Helma Malini
Universitas Tanjungpura
helma.malini@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRACT

This paper investigates the short term return behavior of six selected stock market around the world during the Covid-19 Pandemic. USA, Indonesia, India, South Korea, Saudi Arabia and Singapore are selected based on the size of their stock market and the countries have taken a considerable amount of decision and policy to mitigate the risk of before, ongoing and aftermath Covid-19 Pandemic. This studies relies on two major time series investigation techniques, namely Econometric Modeling of returns; The Autoregressive model, Assumption of Linearity, Volatility Modeling of GARCH and its extension. The result showed that stock return behavior happens in six selected countries in different forms. This findings contribute to policy makers particulary on how to shift their policy to mitigate the risk of Covid 19 in financial sector sicne the correlation is strong between the public healthy crisis to the performance of stock market.

Keywords : Stock Return, Covid-19 Pademic, Stock Market, Volatilities, Investor Behavior



MEMBANGUN KEMANDIRIAN INDUSTRI BENIH PADI NASIONAL

Bambang Sayaka
Kementerian Pertanian
bambangsayaka@gmail.com

Frans BM Dabukke
Kementerian Pertanian

Sri Suharyono
Kementerian Pertanian

ABSTRACT

Demand for rice seed is met by the seed producers and seed produced by farmers themselves. In general, quality rice seed supply of improved variety has not fulfilled the rice farmers' demand. Objective of the study is formulating policy recommendation for empowering rice seed growers such that rice farmers get seed self-reliance. This study was conducted using a survey approach in six provinces. Primary data were analyzed using a farm business cost and income approach. Seed policy in the the regional autonomy changes as market develops. Rice seed production and distribution is relatively well controlled. Rice seed growers tend to choose high-yielding variety according to market demand. The government needs to facilitate rice seed growers such that they are able to produce quality seed and to get profitable selling price. Rice farmers will adopt quality rice seed of improved variety as long as it is high yielding, resistant to pest and disease attack, easily accessed, and affordable.

Keywords: rice, seed, growers, seed system, quality

ABSTRAK

Kebutuhan benih padi selain dipenuhi dari produsen benih juga berasal dari benih yang dibuat oleh petani sendiri. Secara umum pasokan benih padi bermutu dari varietas unggul belum memenuhi kebutuhan petani padi. Tujuan penelitian adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemberdayaan penangkar benih dalam upaya mendukung kemandirian benih padi. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei di enam provinsi. Data primer diolah menggunakan pendekatan biaya dan pendapatan usahatani. Kebijakan perbenihan berubah dalam era otonomi sesuai perkembangan pasar. Produksi dan peredaran benih padi relatif diawasi dengan baik. Penangkar benih padi cenderung memilih varietas berdaya hasil tinggi sesuai permintaan pasar. Penangkar benih padi perlu difasilitasi agar menghasilkan benih bermutu dan dapat dipasarkan dengan harga layak. Prasyarat petani padi untuk mengadopsi benih bermutu dari varietas unggul adalah produktivitas tinggi, tahan serangan hama dan penyakit, mudah diakses dan harga terjangkau.

Kata kunci: padi, benih, penangkar, sitem perbenihan, kualitas

**THE IMPACT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS)
ON STUDENT EXPENDITURE AND SCORES**

Randi Kurniawan
Universitas Hasanuddin
randikurniawan@unhas.ac.id

Rakhmawati
Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

One of the education policies to improve Indonesia's quality of education is the provision of School Operational Assistance (BOS). However, BOS implementation has received much criticism, especially the mis-targeting of budget allocation. This study aims to analyze the impact of the provision of BOS on student expenditures and scores. Using the Indonesia Family Life Survey (IFLS) waves 4 and 5 data, the results of the analysis with the Difference-in-Difference (DID) method find that the provision of BOS impacts increasing student scores. A one percent increase of BOS funds, on average, will increase 2.4 points of student scores. Meanwhile, although the BOS fund decreases the student expenditure on education, the coefficient is not significant. This study results encourage the government to evaluate BOS funds in schools to reduce student spending. The government should regulate the informal fee and voluntary contribution to optimize the BOS program's role in decreasing student expenditure. The government also needs to provide socialization regarding school self-evaluation and improvement plans. Other than that, school committees have to play a role in BOS allocation and in minimizing school fees outside the mandatory school fees.

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksanaan BOS mendapatkan kritik, antara lain terkait sasaran yang tidak tepat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyaluran BOS terhadap pengeluaran dan skor ujian siswa. Dengan menggunakan data dari Indonesia *Family Life Survey (IFLS)* gelombang 4 dan 5, hasil analisis dengan menggunakan *model Difference in Difference* menemukan bahwa penyaluran BOS berdampak pada peningkatan nilai ujian akhir siswa. Setiap satu persen peningkatan dana BOS, maka secara rata-rata akan meningkatkan 2,4 poin nilai ujian. Sementara itu, meskipun dana BOS menurunkan pengeluaran siswa, koefisiennya tidak signifikan. Hasil studi ini mendorong pemerintah mengevaluasi alokasi dana BOS di sekolah untuk mengurangi beban belanja siswa. Pemerintah harus mengatur iuran atau pengeluaran di luar uang sekolah yang wajib dibayarkan, untuk mengoptimalkan peran program BOS dalam menurunkan pengeluaran siswa. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi terkait evaluasi diri dan rencana perbaikan sekolah. Selain itu, komite sekolah juga harus berperan aktif dalam rencana pengalokasian dana BOS serta berusaha berperan agar biaya di luar biaya wajib sekolah dapat ditekan.

EKONOMI DAERAH, PANGAN DAN ENERGI





PENGARUH PEMILIKAN ASSET PENGHIDUPAN TERHADAP KEMISKINAN RUMAH TANGGA TANI

Pantjar Simatupang
Kementerian Pertanian
pantjar@gmail.com

Herlina Tarigan
Kementerian Pertanian

ABSTRACT

Reducing agricultural household poverty is the key for achieving one digit of national poverty incidence. The research intends to identify the livelihood assets of most significant in determining the poverty of the agricultural households in rural Indonesia. The odd of being poor was analyzed by the Sustainable Livelihood Approach with logit probability model and the impact transmission was traced with expenditure function using the CBS Susenas-2017 data. Results show that the livelihood assets that significantly influence the odd of living out of poverty are access to Information and Communication Technology, financial credits, land ownership and household size. Accordingly, the Government should implement agricultural and rural transformation strategy through the Inclusive Agricultural and Rural Development Digitalization Program that integrates agribusinesses, rural economies, agricultural financing, and land optimization and expansion. For the longer run, the program may be complemented with the Family Planning Program for reducing the household size.

Key words: poverty, agricultural household, sustainable livelihood approach, livelihood asset, logit.

ABSTRAK

Pengurangan prevalensi kemiskinan pada rumah tangga pertanian adalah kunci untuk mewujudkan angka kemiskinan nasional menjadi satu digit. Penelitian bertujuan untuk menentukan aset penghidupan yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga tani di pedesaan Indonesia. Kemungkinan terjerumus ke dalam kemiskinan dianalisis dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan memakai model probabilitas logit, dan media transmisi dampak diuji dengan fungsi pengeluaran menggunakan data BPS-Susenas 2017. Penelitian menunjukkan bahwa aset penghidupan yang berpengaruh nyata terhadap kemungkinan rumah tangga tani bebas risiko kemiskinan ialah akses terhadap teknologi informasi dan telekomunikasi digital, akses terhadap kredit finansial, kepemilikan lahan, dan jumlah anggota rumahtangga. Disarankan agar Pemerintah melaksanakan strategi transformasi pertanian dan pedesaan melalui Program Digitalisasi Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan yang mengintegrasikan usaha pertanian dengan perekonomian desa, pembiayaan pertanian serta optimasi dan ekstensifikasi lahan. Dalam jangka yang lebih panjang program tersebut dikomplementasikan dengan Program Keluarga Berencana untuk mengurangi jumlah anggota rumantangga.

Kata kunci: kemiskinan, rumah tangga pertanian, pendekatan penghidupan berkelanjutan, aset penghidupan, logit

PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA

Vitriyani Tri Purwaningsih
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
vitriyanitp@gmail.com

ABSTRACT

Households led by women tend to work more in the informal sector which has low income. This study aims to look at the welfare between informal and formal workers among households led by women. The data used is secondary data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS), with the Two-Stage Least Square (2SLS) analysis method using the instrumental variable approach. The findings of this study indicate that households headed by women who work in the informal sector have lower welfare than formal sector households. In addition, the variable age squared, the number of household members, and the island of Java also found a negative and significant relationship with the per capita expenditure of female households. Women who are older, own agricultural land and have savings are able to increase monthly per capita expenditure. This study concludes that there are gaps between sectors but asset ownership can increase welfare among female households.

Keywords : women, welfare, informal, households, IFLS

ABSTRAK

Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih banyak bekerja pada sektor informal yang memiliki pendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesejahteraan antara pekerja informal dan formal di antara rumah tangga yang dipimpin oleh seorang perempuan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Indonesia *Family Life Survey (IFLS)* 2014, dengan metode analisis *Two Stage Least Square (2SLS)* menggunakan pendekatan instrumental variable. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga sektor formal. Selain itu, variabel umur kuadrat, jumlah anggota rumah tangga dan wilayah pulau Jawa juga ditemukan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga perempuan. Usia kepala rumah tangga perempuan yang lebih dewasa, memiliki lahan pertanian dan tabungan mampu meningkatkan pengeluaran per kapita bulanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan antar sektor namun kepemilikan aset dapat meningkatkan kesejahteraan di antara rumah tangga perempuan.

Kata kunci : perempuan, kesejahteraan, informal, rumah tangga, IFLS

APAKAH PENGGUNAAN INTERNET MENINGKATKAN PENDAPATAN
RUMAH TANGGA?:
STUDI KASUS PERDESAAN INDONESIA

M. Fahmi Priyatna
Bank Indonesia Institute
m_fahmi.i@bi.go.id

ABSTRACT

This study analyzes the effect of internet utilization on household income in rural Indonesia using Sakernas 2018 data. This research uses propensity score matching (PSM) and a probit model to achieve the research objectives. The results show that the probabilities of using internet are caused by family size, age of the head of the household, work experience, marital status, formal and informal education, experiencing severe difficulties in bodily functions, gender, business sector, and financial management. Furthermore, the study finds that the internet utilization increases household income in rural Indonesia by 29 percent.

Keywords: internet use, income, propensity score matching (PSM), probit model, household, rural Indonesia

JEL Classification: D31, O15, O18, O33

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan internet terhadap pendapatan rumah tangga di perdesaan Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2018. Penelitian ini menggunakan propensity score matching (PSM) dan model probit untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas penggunaan internet dipengaruhi oleh ukuran keluarga, umur kepala rumah tangga, pengalaman dalam pekerjaan, status pernikahan, pendidikan formal dan informal, migrasi, memiliki kesulitan/gangguan parah pada fungsi tubuh, gender, lapangan usaha, dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa penggunaan internet meningkatkan pendapatan rumah tangga di perdesaan Indonesia sebesar 29 persen.

Kata kunci: penggunaan internet, pendapatan, *propensity score matching (PSM)*, model probit, rumah tangga, perdesaan Indonesia

Klasifikasi JEL: D31, O15, O18, O33

PEMETAAN KEMISKINAN MELALUI
PENDEKATAN *GEOGRAPHICALLY WEIGHTED LASSO*

Rita Herawaty Br Bangun
BPS Provinsi Sumatera Utara
rita.bangun@bps.go.id

Aida Meimela
Universitas Padjajaran

ABSTRACT

Geographically Weighted Lasso (GWL) can be used as a tool for analyzing poverty through spatial approaches. North Sumatera is one of the highest poverty-level provinces in Indonesia. The purpose of this research analyzes poverty according to regional variations with spatial approaches through the application of GWL methods. This research uses secondary data derived from the published book and the BPS page. Based on the research results the GWL method can overcome the local multicollinearity and heterogeneity in spatial data. The results showed that 85.93 percent of poverty in North Sumatra could be explained by all predictor variables using GWL models. A significant variable in many district/city areas to model the poverty level in North Sumatra is the percentage of households with a floor area below 8 m², a half-unemployment rate, and a percentage of informal workers. Poverty modeling with the GWL method can increase the accuracy of the parameter estimation so that the poverty alleviation program in North Sumatra will be more effective if adjusted to the characteristics of each region.

Keywords: geographically weighted lasso, heterogeneity, multicollinearity, poverty, spatial

ABSTRAK

Geographically Weighted Lasso (GWL) dapat digunakan sebagai alat dalam menganalisa kemiskinan melalui pendekatan spasial. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini menganalisis kemiskinan menurut variasi wilayah dengan pendekatan spasial melalui penerapan metode GWL. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari buku publikasi dan laman BPS. Berdasarkan hasil penelitian metode GWL mampu mengatasi multikolinieritas lokal dan heterogenitas pada data spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,93 persen kemiskinan di Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh seluruh variabel prediktor menggunakan model GWL. Variabel yang signifikan di banyak wilayah kabupaten/kota untuk memodelkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara adalah persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 8 m², tingkat setengah pengangguran dan persentase pekerja informal. Pemodelan kemiskinan dengan metode GWL mampu meningkatkan ketepatan estimasi parameter sehingga program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara akan lebih efektif jika disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Kata kunci: *geographically weighted lasso*, heterogenitas, kemiskinan, multikolinieritas, spasial

EKONOMI KREATIF, DIGITALISASI DAN UMKM





**THE IMPORTANCE OF EWOM ELEMENTS ON ONLINE
REPURCHASE INTENTION: ROLES OF TRUST AND
PERCEIVED USEFULNESS**

Raden Bernard Eka Hutomo Putra Maduretno
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
bernardeka20@gmail.com

Sheellyana Junaedi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of online reviews elements (eWOM quantity, credibility, and quality) toward customer's online repurchase intention through mediating roles of online seller trust and perceived usefulness of the website. A partial least square (PLS) based structural equation modeling (SEM) was chosen to evaluate the measurement of research constructs and test the research hypotheses. Data collected through online questionnaires in Yogyakarta, Indonesia. The criteria of the respondents used were college students who have read online recommendations before made purchases on bukalapak.com. The results revealed that the credibility and quality of eWOM have a positive direct effect on consumer's repurchase intention while the quantity has a negative influence. eWOM credibility and quality indirectly influence repurchase intentions through trust in the online vendor. The perceived usefulness of the website only mediates the influence of eWOM quality on online repurchase intention. Limitations and further research were also discussed.

Keywords: Credibility; E-commerce; eWOM; Information Overload; Quality Information; Repurchase Intention.



KETAHANAN ENTREPRENEUR PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Paskanova Christi Gainau

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado
paskanovagainau@stiebenzar.ac.id

Yuli Rawun

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado
yulirawun@stiebenzar.ac.id

ABSTRACT

The outbreak of Covid-19 has weakened performance of micro businesses. Women as micro-entrepreneurs have also been affected by this virus. Entrepreneurs do various ways to maintain the survival of their businesses. This study aims to examine the factors that influence performance of micro businesses in the city of Manado. The sample of this study was 30 micro businesses in Manado City that were stratified randomly sampling. After distributing questionnaires, observations, and interviews with women entrepreneurs, data analysis was carried out with SmartPLS 3.0 M3. The results of the study found that trust and network have a significant influence on the performance of micro businesses along crisis. The applied implication is that businesses need to establish good relationships with customers as a form of building trust and networking. This is important because trust and networking can enable businesses to survive in the midst of a crisis. In addition, businesses can also improvise products in times of crisis to keep cash flow running.

Keywords: women entrepreneur, business performance, trust, smartPLS

ABSTRAK

Mewabahnya virus Covid-19 telah melemahkan kinerja usaha mikro. Perempuan sebagai pelaku usaha mikro turut terdampak hal ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro di Kota Manado. Sampel penelitian adalah 30 usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha perempuan di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Sampel dipilih secara acak. Setelah mendistribusikan kuesioner, observasi, dan wawancara, analisis data dilakukan dengan SmartPLS 3.0 M3. Hasil kajian menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro di masa krisis. Implikasi terapannya adalah pelaku usaha perlu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sebagai bentuk membangun kepercayaan dan jaringannya. Hal ini penting karena kepercayaan dan jaringan dapat memungkinkan usaha untuk bertahan di tengah krisis. Selain itu, pelaku usaha juga dapat melakukan improvisasi produk di masa krisis agar arus kas tetap berjalan.

Kata Kunci: entrepreneur perempuan, kinerja usaha, kepercayaan, smartPLS

PERAN PERCEIVED EFFECTIVENESS OF ESCROW SERVICES PADA E-COMMERCE DI INDONESIA

Ratna Dewi Kusumawati
Universitas Bina Insani
ratnadewi@binainsani.ac.id

Hanif Aulawi
Universitas Bina Insani
hanifaulawi@binainsani.ac.id

ABSTRACT

E-commerce grows like mushrooms in the rainy season. Quoted from iPrice, in the fourth quarter of 2019 the number of e-commerce in Indonesia reached 47 e-commerce. During the corona pandemic like today, e-commerce is the backbone of sales transactions. People are reluctant to leave the house and prefer shopping from home by using various applications provided by e-commerce managers. One of the important things in choosing e-commerce by the community is the factor of satisfaction and trust. The public will be very careful in spending their money on e-commerce transactions. The satisfaction factor on previous purchases has grown into a belief in e-commerce. In order to increase consumer confidence, e-commerce managers offer escrow services. This research is a quantitative research by collecting data through questionnaires. The results show that the satisfaction felt by respondents with previous purchases can affect consumer confidence in sellers. The PEES variable is able to moderate the relationship between the satisfaction and trust variables.

Keywords: E-commerce, Escrow, Satisfaction, Trust.

ABSTRAK

E-commerce tumbuh bak cendawan dimusim hujan. Dikutip dari iPrice, tahun 2019 kuartal 4 jumlah *e-commerce* di Indonesia mencapai 47 *e-commerce*. Dimasa pandemi corona seperti saat ini, *e-commerce* menjadi tulang punggung transaksi penjualan. Masyarakat enggan keluar rumah dan lebih memilih belanja dari rumah dengan menggunakan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pengelola *e-commerce*. Salah satu hal penting dalam pemilihan *e-commerce* oleh masyarakat adalah faktor kepuasan dan kepercayaan. Masyarakat akan sangat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya pada transaksi *e-commerce*. Faktor kepuasan pada pembelian sebelumnya tumbuh menjadi sebuah kepercayaan terhadap *e-commerce* tersebut. Guna meningkatkan kepercayaan konsumen, pengelola *e-commerce* menawarkan jasa escrow. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan yang dirasakan oleh responden terhadap pembelian sebelumnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap penjual. Variabel PEES mampu memoderasi hubungan antara variabel kepuasan dan kepercayaan.

Kata kunci: *E-commerce*, *Escrow*, Kepuasan, Kepercayaan.

BITCOIN IN INDONESIA: HEDGING OR INVESTMENT INSTRUMENT?

William Wardoyo
Universitas Indonesia
william.wardoyo@gmail.com

Chaikal Nuryakin
Universitas Indonesia

Sean Hambali
Universitas Indonesia

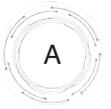
ABSTRACT

Uncertainties might compel many investors to hedge by buying globally traded assets, such as Bitcoin, which has also been used as a means of payment in several countries. Bitcoin does not originate from any centralized authority and cannot entirely be controlled; therefore, Bitcoin usage might potentially pose issues to the monetary authorities within a country. This paper analyzes the effect of both global and domestic uncertainty on Bitcoin's demand in Indonesia. Our result suggests that Bitcoin is used for hedging against uncertainties. The monetary policy implications of our results are also discussed.

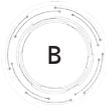
Keywords: Economic uncertainty, Exchange rate, Asset, Hedging, Bitcoin

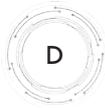
JEL: G12, D84





**Prosiding Sidang Pleno ISEI XXI &
Seminar Nasional 2020
FOTO-FOTO ZOOM SESSION**

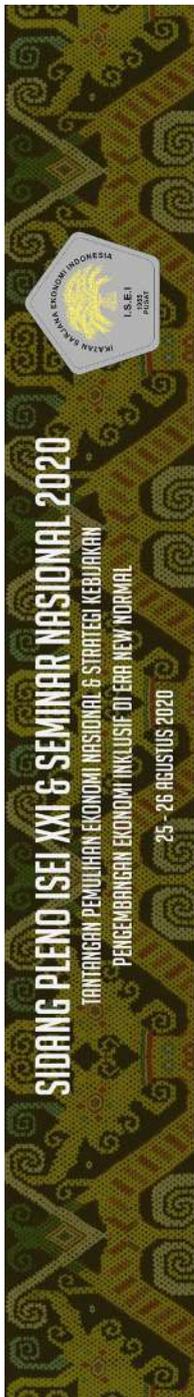




TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL & STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL

SIDANG PLENO ISEI XXI DAN SEMINAR NASIONAL 2020





PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Mengucapkan Terimakasih Kepada Seluruh Pendukung
Terselenggara dengan sukses

SIDANG PLENO ISEI XXI & SEMINAR NASIONAL 2020



BCA



DJARUM



BANK BRI



BNI mandiri

Melayani Negeri, Kabangsaan Bangsa

PENDUKUNG SILVER



Sahabat Keluarga Indonesia





IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Jl. Daksa 4 No.9, Jakarta 12120

Phone : (021) 7208130

Fax : (021) 7208130

Email : isei.pusat@gmail.com

www.isei.or.id

ISBN 978-602-14722-8-6

